

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PUBLIK BERBASIS
WEBSITE DI DESA TAENG KECAMATAN PALLANGGA
KABUPATEN GOWA**



Oleh:

A.HILDAYANTI

Nomor Induk Mahasiswa : 10561 11228 18

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2022

SKRIPSI

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PUBLIK BERBASIS WEBSITE DI DESA TAENG KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh
Gelar Sarjana Administrasi Publik (S. A.P)

Disusun Oleh:

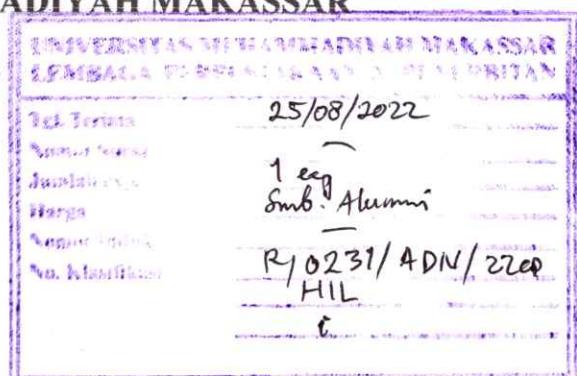


A.HILDAYANTI

Nomor Induk Mahasiswa: 10561 11228 18

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2022



HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Judul Skripsi : Implementasi Sistem Informasi Publik Berbasis Website di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa

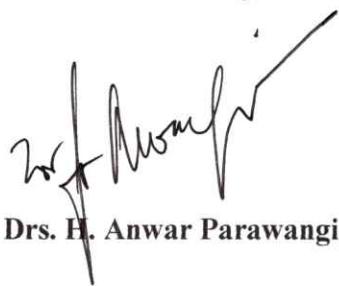
Nama Mahasiswa : A.Hidayanti

Nomor Induk Mahasiswa : 105611122818

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. Drs. H. Anwar Parawangi, M.Si

Pembimbing II



Rasdiana, S.Sos., M.Si

Mengetahui :

Dekan
Fisip Unismuh Makassar



Dr. Hyam Malik. S.Sos, M.Si
NBM: 730727

Ketua Program Studi Ilmu
Administrasi Negara



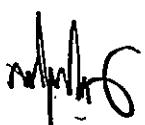
Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si
NBM: 991742

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 060/FSP/A.4-II/VIII/44/2022 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada Hari Sabtu Tanggal 06 bulan Agustus tahun 2022

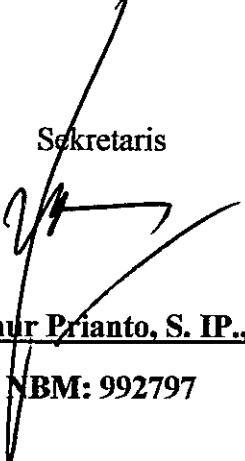
TIM PENILAI

Ketua


Dr. Hj. Ihyani Malik, S. Sos, M.Si

NBM: 730727

Sekretaris


Andi Luhur Prianto, S. IP., M. Si

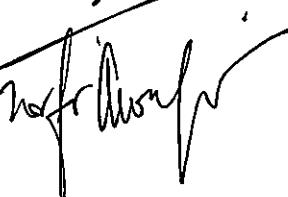
NBM: 992797

PENGUJI

1. Dr. H. Muh Isa Ansyari, M. Si

()

2. Dr. Drs. H. Anwar Parawangi, M. Si

()

3. Dr. Haerana, S.Sos., M.Si

()

4. Sitti Rahmawati Arfah, S.Sos, M. Si

()

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : A.Hidayanti

Nomor Induk Mahasiswa : 10561 11228 18

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan pemberian sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 16 Februari 2022

Yang Menyatakan,



A.Hidayanti

ABSTRAK

A.Hidayanti, Anwar Parawangi, Rasdiana. 2022. Implementasi Sistem Informasi Publik Berbasis Website di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

Implementasi sistem informasi publik berbasis website di desa taeng yaitu mengimplementasikan sistem informasi publik berbasis website di Desa Taeng dari pengimplementasian itu desa taeng bisa menjadi desa mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi sistem informasi publik berbasis website di desa taeng kecamatan pallangga kabupaten gowa. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 6 (Enam) orang yang ditentukan menggunakan *purposive sampling*.

Hasil penelitian terdiri dari empat aspek yaitu: 1) Komunikasi dari transmisi, kejelasan dan konsistensi penyaluran komunikasi antara pemerintah dan masyarakat masih kurang efektif. 2) Struktur Birokrasi terdiri dari SOP dan fragmentasi sudah terlaksana sesuai dengan aturan yang berlaku. 3) Sumberdaya terdiri dari SDM,dikatakan belum efektif karena masih membutuhkan staff untuk mengoperasikan website, sarana dan prasarana yang digunakan sudah memadai. 4) Disposisi sudah efektif dengan adanya dukungan dari kepala desa beserta masyarakat. Adapun faktor pendukung yaitu struktur birokrasi sudah berjalan sesuai aturan, sarana dan prasarana yang digunakan sudah memadai, dan disposisi mendapatkan dukungan dari kepala desa dan masyarakat, faktor penghambat yaitu komunikasi sudah berjalan meskipun belum optimal, serta SDM yang masih membutuhkan penambahan staff.

Kata Kunci: Implementasi, Sistem Informasi, Publik, Website

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur yang sebesar-besarnya penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karunianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan dan mempersembahkan skripsi ini, bukti dari perjuangan yang panjang dan jawaban atas do' a yang senantiasa mengalir dari orang-orang terkasih. Solawat serta salam juga peneliti sampaikan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang biadab menuju alam yang beradab, yang telah menggulung tikar-tikar kebodohan dan membentangkan tikar-tikar kebenaran.

Skripsi dengan judul "**Implementasi Sistem Informasi Publik Berbasis Website di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa**" sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Andi Takbir dan Ibunda Erna yang telah berjuang demi kesuksesan anaknya, yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik dengan sepenuh hati dalam buaian kasih sayang kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Drs. H. Anwar Parawangi, M.Si selaku Pembimbing I dan Ibu Rasdiana, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan

waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

2. Bapak Prof. DR. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Ihyani Malik, S. Sos., M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Nur Wahid, S.Sos.,M.Si selaku Plt. Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan segala ilmu yang dimiliki selama proses pembelajaran di kampus sehingga dapat menjadi pengetahuan yang sangat berharga bagi penulis ke depan.
6. Bapak Kepala Desa Taeng H. Nurdin Yasin atas bantuan yang di berikan berupa izin melaksanakan penelitian.
7. Bapak Sekertaris Desa Taeng Muh. Kasim, SH atas bantuan yang di berikan berupa informasi untuk penelitian.
8. Ibu Kaur Administrasi Sardiah atas bantuan yang di berikan berupa informasi untuk penelitian.
9. Staff Kantor Desa Taeng, Kepala Dusun serta Masyarakat Desa Taeng atas segala bantuan selama peneliti melaksanakan penelitian.
10. Saudara Kandung penulis A.Alpian Mappisabbi, Andi Adit Febrian M, A.Putri Nia Ramadhani M., Andi Mappaita Mappisabbi yang telah mendukung dan mendoakan penulis.

11. Sahabat penulis Ibnu ihsanul fauzi Al-boneh, S.Kom., Andi Sengngeng Khairunnisa, S.Psi., Mila suli ramadhani, S.pd., Nurul qolbi ramadhani, S.M Annisa rachmi anjani, S.I.P., Arsyanni Yuli Anjani, S.I.P., yang selalu membantu penulis menyusun skripsi serta memotivasi dengan tulus dan ikhlas terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya.
12. Teman seperjuangan penulis Riskasari, S.AP., Nur fitra tsania, S.AP., Andi Putri Nurul Ismi, S.AP., St. Murda Annisa, S.AP., Muh. Ruslan, S. IP., Dian Ekawati, S.IP., Rahmawati, S.AP., Hasriani, S.AP., Madina almunawarah, S.AP, Windy Sukma, S.AP. Dan juga Teman-teman kelas ADN-E 2018 yang selama ini sudah seperti saudara yang memberikan banyak kebahagiaan dan motivasi kepada penulis. Serta kakanda Hardiansyah, S.Sos yang sudah banyak membantu penulis menyusun skripsi dengan tulus.
13. Semua keluarga, sahabat, teman-teman, serta berbagai pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu yang telah membantu penulisan dengan ikhlas dalam penyelesaian studi penulis.
14. Terkhusus untuk Bangtan Sonyoendan, Leader Kim Namjoon, Kim Soekjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Joen Jungkook, serta Army, yang telah memotivasi dan menghibur penulis saat kelelahan menulis skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 16 Februari 2022



A.Hidayanti

DAFTAR ISI

SKRIPSI	I
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR.....	III
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	IV
ABSTRAK	V
KATA PENGANTAR	VI
DAFTAR ISI	IX
DAFTAR TABEL.....	XIII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Penelitian Terdahulu	6
C. Kerangka Pikir	37
D. Fokus penelitian.....	39
E. Deskripsi Fokus Penelitian	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Waktu dan Lokasi.....	41
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	41
C. Informan	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Teknik Pengabsahan Data	44

F. Teknik Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	46
B. Hasil Penelitian.....	65
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	80
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	7
Tabel 3.1 Informan	42
Tabel 4.1 Struktur Pemerintahan.....	56
Tabel 4.2 Berita Lokal Pada Tampilan Website Desa Taeng	51
Tabel 4.3 Data Wilayah Administratif	67
Tabel 4.4 Data Pendidikan.....	68
Tabel 4.5 Data Pekerjaan	68
Tabel 4.6 Data Agama	69
Tabel 4.7 Data Berdasarkan kelompok Umur.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 <i>Model Direct and Indirect impacts implementation (edward 1980)</i>	12
Gambar 2.2 <i>Model A fromwork For Implementation Analysis</i>	16
Gambar 2.3 <i>Model implementation as a political and Administrative process</i>	24
Gambar 2.4 <i>An Integrated Implementation</i>	25
Gambar 2.5 Skema Sistem Informasi.....	33
Gambar 3.1 Kerangka pikir.....	38
Gambar 4.1 Peta Lokasi Desa Taeng	48
Gambar 4.2 Bagan Struktur Organisasi.....	51
Gambar 4.4 Arus komunikasi	6

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan Desa merupakan pemerintahan yang berada di tingkat terbawah. Pemerintahan Desa sebagai penunjang untuk suatu wilayah terkecil dalam Desa, yang memiliki jutaan jumlah penduduk sehubung dengan banyaknya wilayah serta tingkat kelahiran penduduk. Sehingga dalam rangka memenuhi “Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, aparatur Desa dengan berbagai upaya harus dapat melakukan inovasi secara tepat, sehingga tujuan kebijakan hukum tersebut tercapai sesuai dengan maksud dan tujuannya”.

Menurut “UU Desa No 32/2004 tentang Pemerintah Daerah dan PP No 72/2005 tentang Desa tidak diatur secara khusus, mengenai sistem informasi seperti SID. Undang-undang Desa ini menegaskan bahwa sistem informasi desa itu penting dalam perencanaan dan pembangunan desa, oleh karena itu dalam pasal 86 ayat 2 dan ayat 5 mewajibkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sistem informasi desa, dan pengelolanya dilakukan oleh Pemerintah Desa agar dapat diakses oleh masyarakat desa pemangku kepentingan lainnya. Ayat 62 menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa”.

Sistem informasi Desa merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan oleh implementasi Undang-Undang Desa. pada Bagian Ketiga UU Desa Pasal 86 perihal Sistem informasi Pembangunan Desa serta Pembangunan daerah

Perdesaan jelas disebutkan bahwa desa berhak menerima akses informasi melalui sistem informasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota. Bagian ketiga “Sistem informasi Pembangunan Desa serta Pembangunan daerah Perdesaan” Pasal 86 yaitu : (1) Desa berhak menerima akses informasi melalui sistem informasi Desa yg dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (2) Pemerintah serta Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan daerah Perdesaan. (3) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud di ayat 2 mencakup fasilitas perangkat keras serta software, jaringan, dan sumber daya manusia. (4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mencakup data Desa, data Pembangunan Desa, daerah Perdesaan, dan informasi lain yg berkaitan menggunakan Pembangunan Desa serta pembangunan daerah Perdesaan.(5) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud di ayat 2 dikelola oleh Pemerintah Desa dan bisa diakses oleh masyarakat Desa serta seluruh pemangku kepentingan.(6) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa. (sumber : UU 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Desa Taeng merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa yang sudah menggunakan pelayanan Sistem informasi yang berbasis website dengan URL : [Desa_Taeng\(karyabangun.co.id\)](http://Desa_Taeng(karyabangun.co.id).).Implementasi Sistem Informasi Publik pada desa berbasis website ini dapat mempermudah pemerintah Desa Taeng dalam

melayani masyarakat dan juga mempermudah masyarakat mendapatkan informasi dimana pun dan kapan pun asal terhubung dengan internet, serta dapat dengan mudah mengakses layanan yang telah di berikan oleh pemerintah desa. Dengan adanya Implementasi Sistem Informasi ini pemerintah desa di harapkan mengelola dengan baik serta memperbarui data data pada website desa taeng. Pencapaian dari implementasi sistem informasi desa berbasis website ini juga sangat berkaitan dengan pelayanan pemerintah desa terhadap masyarakat.

Implementasi Sistem Informasi Publik ini bertujuan untuk mempermudah penyebaran data, mempermudah dalam pelayanan, serta mempermudah dalam transpransi keuangan. Mempermudah dalam penyebaran data contohnya data data jumlah masyarakat yang ada di desa taeng, melalui tampilan website pemerintah desa ini dapat mempermudah masyarakat desa taeng maupun masyarakat luar yang berkunjung, sedangkan mempermudah dalam pelayanan contohnya pelayanan surat keterangan yang bisa dilakukan secara online dengan cara mengakses tampilan layanab yang ada pada website yang di sediakan oleh pemerintah desa, dan juga contoh mempermudah transparansi keuangan yaitu masyarakat dapat mengakses website pemerintah desa untuk melihat sejauh mana pengeluaran, pemasukan yang ada di desa taeng tanpa harus bertanya secara langsung kepada pemerintah desa serta tidak membuat masyarakat berpikiran negatif mengenai keuangan desa yang dikelola oleh pemerintah desa taeng.

Adapun hambatan terkait Sistem Informasi Publik Berbasis Website yang ada di desa taeng yaitu pemerintah desa yang mengelolah website tersebut tidak memperbaharui tampilan data - data yang ada di website desa taeng, sehingga masyarakat juga kurang berpartisipasi terkait website yang di sediakan oleh pemerintah desa dan juga masyarakat masih membutuhkan pelayanan manual di kantor desa taeng, sedangkan pelayanan terhadap masyarakat ini seharusnya dapat di lakukan dengan mudah dan cepat dengan bantuan pelayanan website desa serta masyarakat juga masih kurang berpartisipasi dalam mengakses website tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, maka tepat kiranya jika peneliti mengangkat judul, “**Implementasi Sistem Informasi Publik Berbasis Website**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah:

1. Bagaimana Implementasi Sistem Informasi Publik Berbasis Website Pada Desa Taeng di tinjau dari unsur : Komunikasi, Struktur Birokrasi, Sumber Daya dan Disposisi ?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat Implementasi Sistem Informasi Publik Berbasis Website Pada Desa Taeng?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Sistem Informasi Publik Berbasis Website Pada Desa Taeng
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat dan mendukung Implementasi Sistem Informasi Publik Berbasis Website Pada Desa Taeng.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang sudah dikemukakan, maka manfaat penelitian ini, merupakan:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan pemahaman tentang Implementasi Sistem Informasi Publik Berbasis Website pada Desa Taeng yang seperti pelayanan, promosi dan transparansi keuangan.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini memberikan berupa masukan bagi pihak pemerintah desa sehingga dapat mengembangkan dan mengelolah Sistem Informasi Publik Berbasis Website yang telah ada, sehingga masyarakat dengan mudah mendapatkan pelayanan, data desa serta transparansi pada keuangan desa

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelusuran terhadap suatu karya-karya ilmiah terdahulu yang berkaitan, untuk menghindari duplikasi kesahihan dan keabsahan penelitian yang dilakukan penelusuran dan telah mendapatkan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini, sebagai berikut :

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1.	Junia Bonivasia Ina Kaka (2021)	Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Melalui Sistem Informasi Desa Di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman,DIY	Jenis Kualitatif Tipe Deskriptif, Teori yang digunakan yaitu "Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman" Suparto (2019:111).	Hasil penelitian terdapat beberapa kesimpulan yg pertama, pemerintah desa melakukan beberapa strategi pada meningkat pelayanan publik melalui sistem informasi desa yaitu kurangnya jaringan yang terdapat pada Desa Wonokerto membentuk kegiatan yang bekerjasama dengan sistem tidak berjalan dengan maksimal adapun upaya Pemerintah Desa Wonokerto seperti memasang Wifi yg didanai oleh desa, menyampaikan penyuluhan menggunakan mempromosikan Sidcwo.id, pencrapan sistem informasi yang berkaitan menggunakan pelayanan, serta memberikan informasi melalui papan info serta spanduk.
2	Siti Kurnia Rahayu, Lilis Puspita Wati, Sri Dewi Anggadini (2014).	Analisis budaya organisasi pada pengembangan sistem informasi di unikom	Jenis Verifikatif Tipe Deskriptif, Teori yang digunakan yaitu " Fungsi Budaya dalam Organisasi" (Robbins, 2007).	Hasil penelitian ini mengambarkan bahwa budaya organisasi menyampaikan dampak terhadap pengembangan sistem informasi yang sedang berjalan pada lingkungan Universitas komputer Indonesia.

3	Ni Made Marlita Puji Astuti, Ida Bagus Dharmadiaksa, (2014).	Pengaruh Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Pemanfaatan dan Kesesuaian Tugas dengan Teknologi Informasi pada Kinerja Karyawan	Jenis Kuantitatif Tipe Deskriptif, Teori yang digunakan yaitu : "Sistem Informasi Akuntansi " (Widjajanto, 2001)	Hasil penelitian ini memberikan efektivitas penerapan sistem informasi akuntansi, pemanfaatan serta kesesuaian tugas menggunakan teknologi informasi memiliki dampak yg positif serta signifikan terhadap kinerja karyawan.
---	--	--	--	---

Berdasarkan dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian sebelumnya yang di tulis oleh (1) (Kaka, 2021) , (2) (Rahayu & Anggadini, 2014) , dan (3) (Puji Astuti & Dharmadiaksa, 2014), terdapat persamaan dengan penulis yaitu sama-sama mengangkat tema Sistem Informasi, memberikan informasi kepada masyarakat. Dan letak perbedaannya terdapat di penelitian sebelumnya yaitu memberikan informasi dengan cara berkomunikasi secara langsung dengan pemerintah desa sedangkan penelitian ini akan memberikan informasi tanpa harus berkomunikasi kepada pemrintah desa, cukup dengan mengakses website yang telah disediakan oleh pemerintah desa dan juga lokasi berbeda.

B. Konsep dan Teori

Dalam melakukan penelitian ini, ada baiknya diketahui dasar-dasar topik pembahasan yang akan diteliti. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses pemahaman tentang hal yang akan diteliti. Untuk itu, yang akan dibahas dalam kajian pustaka ini adalah pengertian dan teori-teori relevan dengan penelitian yang dilakukan, seperti yang terurai dibawah ini :

1. Kebijakan Publik

a. Defenisi Kebijakan Publik

Kebijakan publik pada umumnya dipahami sebagai salah satu upaya atau tindakan pemerintah yang dibuat dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya, dalam wujud pengaturan ataupun keputusan. Pada praktiknya, kebijakan publik merupakan hasil dari proses politik yang dijalankan dalam suatu sistem pemerintahan negara, yang di dalamnya terkandung langkah-langkah atau upaya yang harus dilaksanakan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara. Dalam praktiknya, kebijakan publik tidak terlepas dari peran dan fungsi aparat pemerintah yang disebut birokrasi.

Menurut David Easton dalam (Anggara, 2014) “Public policy is the authoritative allocation of values for the whole society”(kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat). James E. Anderson (Anggara, 2014) menyatakan bahwa, “Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials” (kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah).

b. Proses Kebijakan Publik

Kebijakan Publik tidak lahir begitu saja sebagaimana telah digambarkan, dimana melalui proses atau tahapan yang cukup panjang.

Anderson dalam (Widodo, 2021) membedakan lima langkah dalam proses kebijakan, yaitu a) *agenda setting*, b) *policy formulation*, c) *policy*

adoption, d) policy implementation, dan e) policy assessment evaluation.

Sedangkan Ripley (Widodo, 2021) membedakan dalam 4 tahapan, yaitu a) *agenda setting*, b) *formulation and legitimating of goal and program*, c) *program implementation, performance, and impact*, d) *decision about the future of the policy and program*.

Menurut Thomas R.Dye dalam (Widodo, 2021) proses kebijakan publik meliputi beberapa hal berikut :

1) Identifikasi masalah kebijakan (*identification of policy problem*)

Identifikasi apa yang menjadi tuntutan (*demands*) atas tindakan pemerintah.

2) Penyusunan agenda (*agenda setting*)

Penyusunan agenda (*agenda setting*) merupakan aktivitas memfokuskan perhatian pada pejabat publik dan media masa atas keputusan apa yang akan diputuskan apa yang akan diputuskan terhadap masalah publik tertentu.

2. Implementasi

a. Defenisi Implementasi

Implementasi secara umum ialah pelaksanaan atau penerapan. Implementasi pula termasuk tindakan atau aplikasi dari sebuah planning yang sudah disusun secara matang, cermat serta jelas. Jadi, implementasi dilakukan Bila telah ada perencanaan yang baik serta matang, atau sebuah planning yang sudah disusun jauh jauh hari sebelumnya, sehingga telah terdapat kepastian serta kejelasan akan planning tersebut. Implementasi juga berarti penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang

menyebabkan masalah atau dampak terhadap sesuatu. Yaitu suatu aktivitas yang direncanakan dan dilaksanakan yang berfokus serta mengacu di adat-istiadat tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Agostiono (Akib, 2010), “implementasi adalah suatu proses yang bergerak maju, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu kegiatan atau aktivitas, sebagai permasalahan yang akhirnya akan menerima suatu masalah yang sesuai dengan tujuan atau target kebijakan itu sendiri”.

Ripley dan Franklin (Rachman, 2018) menyatakan bahwa implementasi ialah apa yang terjadi sesudah undang-undang ditetapkan yang menyampaikan otoritas acara, kebijakan, laba (benefit), atau suatu jenis keluaran yang konkret (tangible output).

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier mendefinisikan implementasi ialah sebagai berikut: “aplikasi keputusan kebijakan dasar, umumnya pada bentuk undang-undangan, tetapi bisa berbentuk perintah perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang krusial atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi problem yang ingin diatasi, menjelaskan secara tegas tujuan atau target yang ingin dicapai, serta aneka macam cara buat menstrukturkan atau mengatur proses implementasi“ Solichin Wahab (Suparno, 2017).

Adapun Teori implementasi Edward III (Widodo, 2011) mengatakan terdapat empat variabel atau yang secara pribadi juga tidak eksklusif bisa

mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari implementasi sebuah kebijakan. Empat variabel atau faktor tersebut antara lain mencakup variabel atau faktor sumberdaya (resources), komunikasi (communication), dan struktur birokrasi (bureaucratic structur), disposisi (dispositions).

b. Model Implementasi

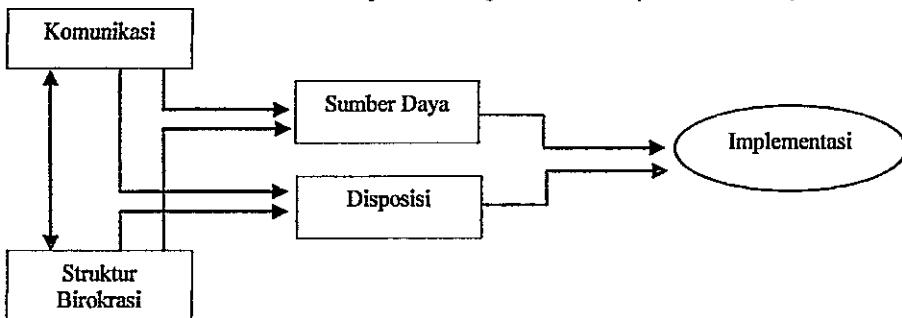
1. Model Edward III

Menurut Edward dalam (Parawangi, 2011) menjelaskan tentang model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C.Edward III (1980) yaitu "Dampak Langsung dan Tidak Langsung terhadap Implementasi" (*Direct and Indirect Impact on Implementation*). Edwards mengemukakan implementasi kebijakan sebagai "Implementasi kebijakan sistem informasi publik merupakan langkah bagi pembuat kebijakan atas suatu kebijakan yang sudah ditetapkan sistem informasi publik serta akibat dari kebijakan itu terhadap orang-orang yang mempengaruhi"(*Policy Implementation of public information system is the stage of policy making between the establishment of a policy public information system and the consequency of the policy for the people whom it affects*). Menurutnya, problem utama administrasi publik merupakan kurangnya perhatian bahwa penghancuran pembuat kebijakan tidak akan dilakukan dengan sukses (lack of attention the decission of policy makers will not be carried out successfully). Edward menyarankan untuk memperhatikan empat informasi utama agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu ; (1)

komunikasi, (2) struktur birokrasi, (3) sumber daya, serta (4) Disposisi sebagaimana tergambar berikut :

Gambar 2.1

Model Direct and Indirect Impacts on Implementation: (Edward :1980).



Variabel kesatu mempengaruhi keberhasilan implementasi dari suatu kebijakan, merupakan komunikasi. Komunikasi menurutnya, sangat memilih keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan. Implementasi yang efektif baru akan tercapai jika para penghasil keputusan (*deciasion maker*) telah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan itu baru dapat berjalan ketika komunikasi sudah berlangsung dengan baik. Artinya, suatu keputusan kebijakan atau peraturan implementasi wajib ditransmisikan pada implementer yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus akurat, konsisten, serta tepat.

Untuk mengetahui sejauhmana komunikasi itu bisa berfungsi secara akurat, konsisten, serta tepat, terdapat 3 indikator yang bisa digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut, yaitu :

- 1) Transmisi: dalam penyaluran komunikasi tak jarang terjadi

miskomunikasi atau kesalahpahaman disebabkan komunikasi melalui beberapa tingkatan birokrasi. Akibatnya, terjadi distorsi bentuk implementasi suatu kebijakan yang gagal.

2) Kejelasan: komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) harus jelas serta tidak membingungkan. Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, namun pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Pada tataran yang lain, hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang hendak ditetapkan.

3) Konsistensi, yaitu perintah yang diberikan untuk pelaksanaan suatu komunikasi yang harus konsisten, serta jelas (agar diterapkan dan dijalankan). Sebab jika perintah yang diberikan terus berubah-ubah, hingga bisa menimbulkan kebingungan bagi pelaksana yang ada di lapangan.

Variabel kedua ialah Sumberdaya. Sumberdaya merupakan suatu hal terpenting untuk mengimplementasikan kebijakan dengan baik. terdapat beberapa faktor yang berpengaruh sehingga sumberdaya bisa berjalan dengan baik,yaitu :

1) Staf, atau lebih tepat dikenaal *Street-level bureaucrats*. Kegagalan seringkali terjadi pada implementasi kebijakan, salah satunya ditimbulkan oleh pegawai/staff yang kurang memadai, tidak kompeten pada bidangnya, serta mencukupi.

2) informasi, pada implementasi kebijakan informasi memiliki 2 bentuk, yaitu a) informasi yang bekerjasama dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus tahu apa yang akan mereka lakukan pada saat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. b) Infomasi mengenai data kepatuhan dari pada pelaksana terhadap aturan serta regulasi pemerintah yang sudah ditetapkan. Implementor perlu tahu apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

3) Wewenang, pada dasarnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah bisa terlaksana. Kewenangan ialah ototritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.

4) Fasilitas, Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi,mengerti apa yang harus dilakukan, serta mempunyai wewenang untuk melaksanakan tugasnya, namun tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana serta prasarana), maka implemenatai kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Variabel ke 3 yang berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan implemenatai kebijakan, bagi George C. Edwad III, ialah disposisi. Bila pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, hingga segala pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan, namun juga harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga pada praktiknya tidak terjadi bias.

Variabel keempat, hal yang tidak kalah pentingnya menurut Edward III turut mempengaruhi level keberhasilan implementasi kebijakan artinya struktur birokrasi. Kebijakan yang sangat kompleks menuntut adanya kerjasama orang banyak . Saat struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini dapat mengakibatkan sumberdaya menjadi tidak efektif serta akan merusak jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan, harus bisa mendukung kebijakan yang sudah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi yang baik. Misalnya di Indonesia, sedikitnya koordinasi serta kerjasama antara stakeholder membentuk implementasi kebijakan yang sesekali mengalami gangguan.

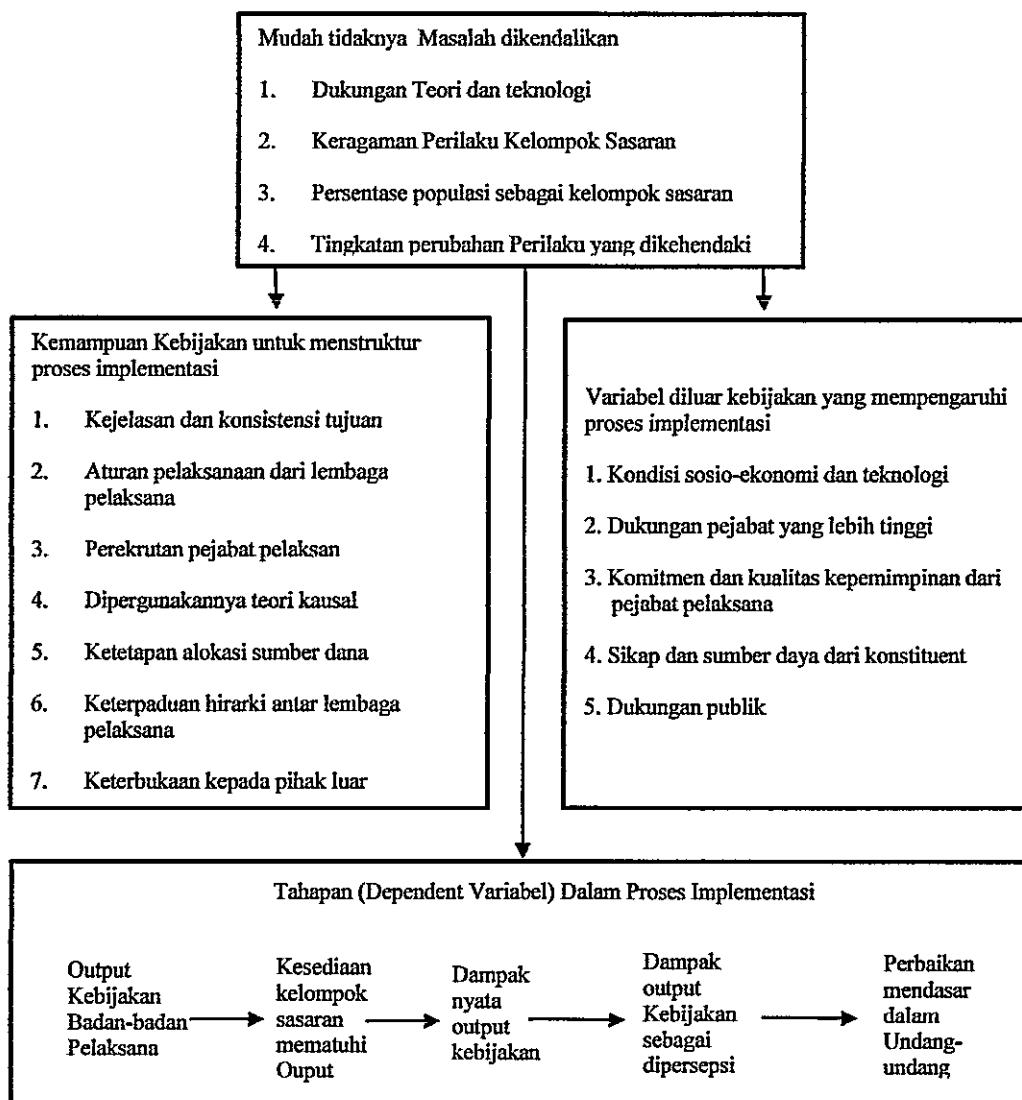
Meski demikian model implementasi kebijakan Edward III yang dijelaskan sebelumnya, memiliki kelebihan yaitu kemampuan menyederhanakan fenomena-fenomena yang kompleks menjadi suatu model implementasi kebijakan yang tidak sulit. Kelemahannya ialah tidak mengidentifikasi serta menjelaskan faktor-faktor di luar birokrasi pemerintahan, atau organisasi pelaksana

2. Model Mazmanian dan Sabatier

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam bukunya *Implementation and Public Policy* (1983:61) mengatakan bahwa : “ pelaksanaan Keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, tetapi bisa juga berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Lazimnya, keputusan tadi mengidentifikasikan problem yang ingin diatasi, mengungkapkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, serta beberapa cara untuk mengatur suatu proses implementasi”, dalam bukunya "Implementation and Public Policy" (1983:61).

Gambar 2.2
Model A Framework for Implementation Analysis



Sumber : Mazmanian dan Paul A. Sabatier; 1983 : 22

Selanjutnya, terkait langkah-langkah dalam Proses Implementasi sebagai Variabel Tergantung atau variabel yang dipengaruhi, menjadi berikut :



Menurut (Parawangi, 2011) dalam model yang dikembangkan Mazmanian dan Sabatier (1983:21-30) sebagaimana digambarkan di atas, yang mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan . Katanya, “*Implementation is the carrying out of basic policy decision, usually incorporated in a statute but with can also take the form of important executives orders or court decision. Ideally, that decision identifies the problem(s) to be addressed, stipulates the objective(s) to be pursued, and, in a variety of ways, 'structures' the implementation process'*”, (Implementasi ialah proses desisi kebijakan dasar, umumnya ada didalam undang-undang tetapi dengan itu juga dapat terbentuk perintah eksekutif penting atau desisi pengadilan Idealnya, bahwa decision mengidentifikasi masalah yang akan ditangani, menetapkan tujuan yang harus dikejar, dan, dalam kemasyhuran cara, 'struktur' proses implementasi). (Dikutif deLeon & deleon,2001,473). Model Mazmanian dan Sabatier disebut model Kerangka Analisis Implementasi (*A Frame Work for Implementation*

Analysis).

Menurut kerangka pemikiran ini, variabel - variabel yang telah mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi bisa diklasifikasi menjadi 3 kategori:

- 1) Variabel Dependen
- 2) Variabel Independen
- 3) Variabel Intervening

Maksud dari ketiga kategori variabel tersebut ialah :

- 1) Variabel dependen yaitu tahapan pada proses implementasi yang menggunakan lima tahapan – tahapan dari badan/lembaga pelaksana dalam bentuk disusunnya kepatuhan objek,kebijakan pelaksana, penerimaan atas hasil nyata tersebut, hasil konkret, serta akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat serta dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar. Terdapat lima tahapan yang dapat mempengaruhi proses implementasi, menggunakan indikator yakni ;
 - a) Kondisi sosio-ekonomi serta teknologi
 - b) Dukungan dari pejabat atasan
 - c) Komitmen serta kemampuan kepemimpinan pejabat- pejabat pelaksana.
 - d) Sikap serta sumber-sumber yang dimiliki kelompok- kelompok
 - e) Dukungan publik

2. Variabel Independen, yaitu simpel /tidaknya problem dikendalikan yang berkenaan menggunakan indikator :

- a) Presentasi kelompok target hampir sama dengan jumlah penduduk
- b) Kesukaran-kesukaran teknis
- c) Keragaman sikap kelompok sasaran
- d) Ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan.

3. Variabel Intervening juga termasuk variabel yang kemampuan kebijakannya untuk menstrukturkan pelaksanaan implementasi, menggunakan indikator :

- a) Kejelasan serta konsistensi tujuan
- b) Digunakannya teori kausal yang memadai
- c) Ketepatan alokasi sumber dana
- d) Keterpaduan hirarki dalam serta diantara lembaga pelaksana
- e) Peraturan keputusan dari badan pelaksana
- f) Rekrutmen pejabat pelaksana
- g) Jalan masuk resmi pihak luar

3 kategori variabel diatas merupakan variabel bebas, yang mempengaruhi tahapan proses implementasi kebijakan. Sesuai model implementasi ini, terlihat keunggulan adanya kemampuan mengidentifikasi serta menjelaskan proses implementasi kebijakan, mulai dari out put kebijakan hingga pada dampak yang didapatkan dari kebijakan tersebut, yaitu ditunjukan sebagai variabel tergantung serta dipengaruhi oleh variabel-variabel bebas yang teridentifikasi sebagaimana ditampilkan pada model di atas. Kelamahannya

ialah model proses implementasi ini tampil relatif. Kerumitannya tak hanya terletak di unsur birokrasi sebagai implementer, namun juga faktor-faktor di luar birokrasi.

3. Teori Merilee S. Grindle (1980)

Selanjutnya, Grindle (1980:6) dalam (Parawangi, 2011) mengemukakan bahwa : “*implementation, a general process of administrative action that can be investigated at specific program level*”, (suatu proses aktivitas administration publik (umum) yang bisa dilaksanakan sesuai tingkatan program) sementara Anderson (1978) mengemukakan bahwa “*policy implementation is the application of the policy by the government’s administrative machinery to the problem*” (implementasi kebijakan adalah aplikasi dari setiap kebijakan administrasi oleh pemerintah melalui tahapan dalam menuntaskan setiap problem).

Menurut (Parawangi, 2011) dalam model yang dikembangkan oleh Merilee S. Grindle (1980) ditentukan oleh isi kebijakan serta Konteks implementasinya. ide dasarnya bahwa sesudah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilan implementasi ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan itu sendiri. Isi kebijakan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut

1. *Content of Policy yang terdiri atas :*

a. Kebutuhan - kebutuhan yang mempengaruhi (*Interest affected*)

Interest Affected ini berkaitan dengan banyak sekali kepentingan yang ikut berpengaruh pada suatu implementasi kebijakan.

Suatu argumen

mengemukakan bahwa mengimplementasikan suatu kebijakan pasti melibatkan banyak kepentingan.

b. Tipe manfaat (*Type of Benefits*)

Di dalam *Type of Benefits* ini berupaya untuk menjelaskan bahwa pada setiap kebijakan harus mempunyai azas manfaat yang bisa menunjukkan adanya harapan positif yang akan dihasilkan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.

c. Perubahan yang ingin dicapai (*Extent of Change Emision*)

Sebab mempunyai harapan positif terhadap pengimplementasian suatu kebijakan, hingga “Tingkat Emisi Perubahan Poin” (*point Extent of Change Emision*) ini, menyimpan keinginan/impian seberapa jauh perubahan yang akan dicapai dengan adanya implementasi kebijakan. Perubahan itu tentunya memberi dampak positif terhadap pencapaian hasil dari suatu kebijakan yang hendak dilaksanakan.

d. Letak pengambilan keputusan (*Site of Decision making*)

Pada umumnya, suatu rumusan kebijakan yang akan diputuskan sebagai suatu kebijakan untuk dimplementasikan, seyogyanya memperhatikan waktu yang tepat untuk mengambil sebuah ketetapan. Letak keputusan yang sempurna bisa melahirkan hasil yang maksimal . Karena itu, *Site of Decision marking*, hendak dijelaskan di mana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

e. Pelaksana program (*program Implementor*)

yang perlu dijelaskan pada point ini ialah dalam melaksanakan suatu kebijakan apapun, atau suatu program, terlebih lagi Jika program itu menyentuh langsung kepentingan publik, seyogyanya didukung oleh pelaksana kebijakan yang handal serta kapabel demi keberhasilan kebijakan.

f. Sumber daya yang dipakai (*Resorces Committed*)

untuk mencapai suatu hasil yang maksimal, maka pelaksanaan suatu kebijakan harus didukung oleh sumberdaya yang potensial, sehingga pelaksanaan kebijakan tersebut bisa berjalan dengan baik seperti yang diharapkan.

2. *Context Policy* (Kebijakan Konteks), sesuai dengan yang dikemukakan oleh Grindle adalah :

a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat (*Power, Interest, and Strategy of Actor Involved*)

Beberapa hal yang perlu diamati ialah seorang aktor yang akan melakukan suatu kebijakan, semuanya memperhatikan kekuatan serta kekuasaan yang ikut berpengaruh, kepentingan yang bermain di dalamnya, dan strategi yang dipergunakan dalam melaksanakan suatu kebijakan. jika hal tadi terabaikan, maka bukan tidak mungkin akan terjadi kendala atau distorsi. Akibatnya, implementasi sebuah kebijakan mengalami kegagalan. dengan demikian, formulasi kebijakan yang akan diimplementasikan sebagai program yang

nyata,tidak lagi berjalan sesuai dengan harapan.

b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa (*Institution, and Regime Characteristic*)

Beberapa faktor yang sangat dibutuhkan ialah lingkungan. Lingkungan yang kondusif sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Artinya, berhasil serta tidaknya pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh implemenator, ditentukan oleh ciri karakteristik serta rezim penguasa.

c. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana (*Compliance and Responsiveness*)

Salah satu faktor penting yang perlu mendapat perhatian dalam proses pelaksanaan satu kebijakan ialah dengan adanya respon serta kepatuhan dalam unsur pelaksana. Karena itu, pada implementasi kebijakan Pilkada, keberhasilan kinerja bisa diukur sejauh mana kepatuhan serta respon pelaksana kebijakan dalam menginterpretasi suatu kebijakan.

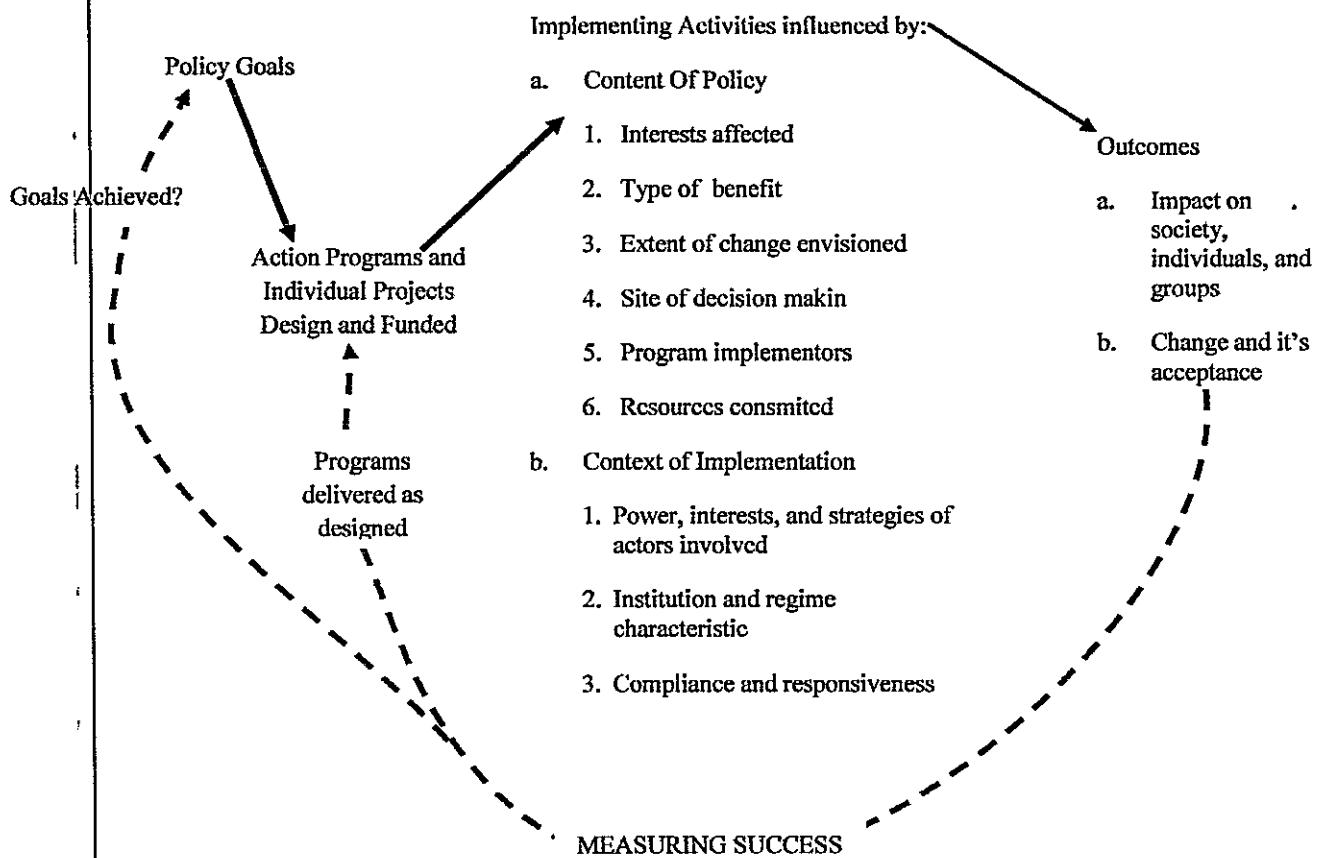
Sementara itu, Grindle juga mengemukakan bahwa pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan bisa dilihat dari masing-masing :

- 1) Pada prosesnya, bisa dilihat pelaksanaan kebijakan, apakah sesuai dengan yang telah ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
- 2) Tujuan kebijakan yang dicapai. Dimensi ini bisa diukur dengan melihat dua faktor, yakni :

- a) Impak atau dampak terhadap warga secara individu serta kelompok.
- b) Level perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran atas perubahan tersebut.

Dari uraian tersebut diatas, sebagaimana model implementasi yang dipaparkan Grindle, mempunyai kelebihan yaitu kemampuan mengidentifikasi serta menjelaskan bukan saja karakteristik birokrasi sebagai pelaksana, namun juga kekuasaan serta kelompok-kelompok penting yang berkaitan dengan implementasi kebijakan tersebut. Kelemahan dari model ini, tak adanya benang merah sebagai penjelas mana variabel yang berpengaruh secara langsung serta mana variabel yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap hasil kebijakan. untuk lebih detailnya model Grindle sebagaimana diuraikan di atas, bisa kita lihat pada gambar berikut :

Gambar 2.3

Model Implementation as a Political and Administrative Process

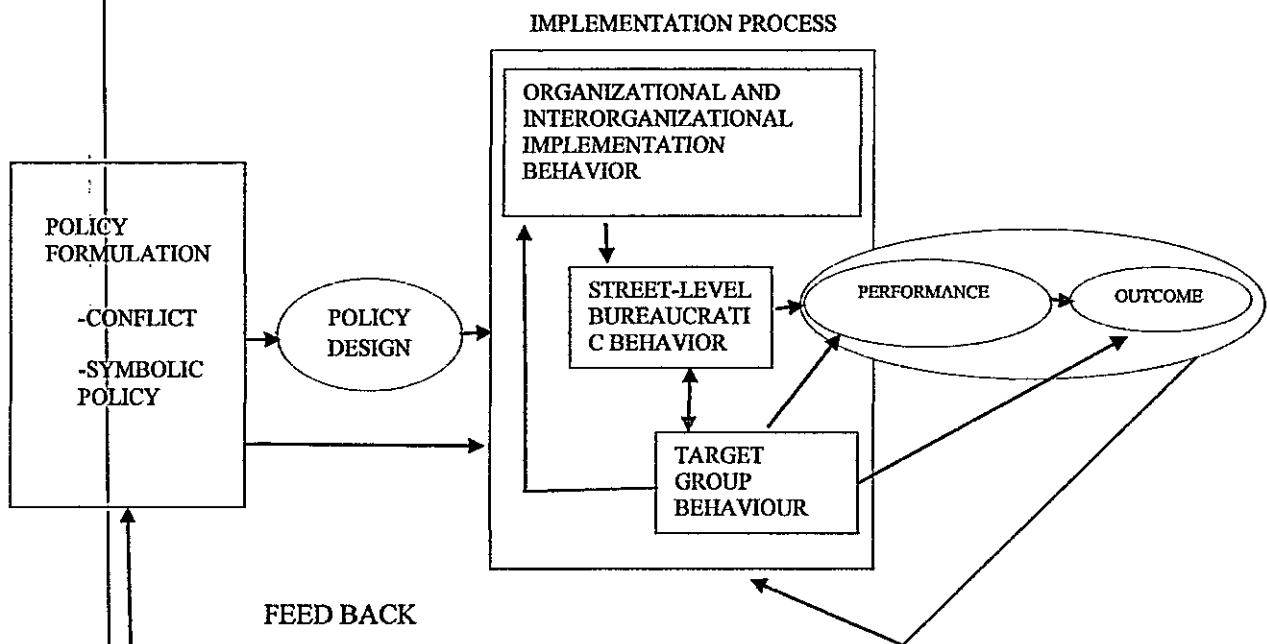
Sumber : Merilee S. Grindle , 1980 : 11

4. Teori Soren C. Winter

Salah satu bentuk bangunan untuk mensinergikan beberapa variable penting dalam penelitian implementasi, maka variabel-variabel tersebut bisa diintegrasikan sebagaimana dipresentasikan oleh Winter (2004) yang dikenal dengan sebutan "*An Integrated Implementation model*". Beberapa faktor kunci pada model tersebut dipergunakan sebagai prinsip utama pada pengorganisasian yang menstrukturalisasikan pada beberapa bagian pebahasan sebelumnya.

Gambar 2.4

An Integrated Implementation Model



Sumber : Model Soren C.Winter. 2004 :207

(Winter, 2004) menekankan bahwa dalam konteks sosio-ekonomi keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh :1) formulasi kebijakan; 2) proses implementasi kebijakan; dan 3) dampak/hasil implementasi kebijakan. Selanjutnya dikemukakan variabel-variabel yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan sebagai berikut :

a. Perilaku organisasi dan antarorganisasi (*Organizational and inter-organizational behavior*). Dimensi-dimensinya adalah komitmen dan koordinasi antar organisasi.

Implementasi kebijakan publik untuk mencapai tujuan yang terbaik, jarang terjadi pada kelompok itu sendiri, tanpa menggunakan organisasi lain sebagai pendukung atau piranti pelaksana. Implementasi kebijakan memerlukan hubungan antar organisasi untuk membawa perubahan kebijakan umum kepada hukum yang nyata, dan juga akan berlangsung secara bekelanjutan pada proses sosial yang bisa mengkonversi arah kebijakan melalui tindakan. Proses implementasi bisa diterapkan melalui banyak cara. salah satu cara di antaranya merupakan implementasi kebijakan yang bisa terpenuhi pada satu organisasi (Torevlied,1996). Namun, agar kinerja implementasi lebih efisien serta efektif, membutuhkan kerjasama serta koordinasi berbagai organisasi, atau bagian-bagian organisasi itu (Hjer dan Porter,1981). Level implementasi bisa ditempuh pada organisasi resmi, sementara administrasi pemerintahan bisa diterapkan melalui hasil kebijakan (O'Toole,1996a).

Perkembangan yang berkaitan antar organisasi belakangan ini semakin terkenal, sehingga para praktisi serta sarjana melahirkan kata ‘*kolaboratif*’ (Bardach,1998), yang memilih serta mempengaruhi hasil suatu program. Beberapa tahun terakhir muncul kata yang lebih dikenal ‘jaringan’, serta ‘manajemen jaringan’ (Hufen dan Ringeling,1990 ; Kickert et al,1997; O’Toole,1997b). Secara keseluruhan Istilah ini sudah populer, sehingga koordinasi mempunyai kaitan antar organisasi yang bisa menaikkan serta menentukan pola implementasi kebijakan.

Adapun faktor berikutnya yaitu suatu proses implementasi kebijakan organisasi serta antar organisasi yang ditandai oleh hadirnya sebuah komitmen dan juga koordinasi (Winter,2004). pada tingkatan implementasi, komitmen yang dimaksud ialah kesepakatan bersama dengan instansi yang terkait serta menjaga stabilitas organisasi dan jaringan antar organisasi yang sudah ada, sehingga berkaitan dengan pelaksanaan program. Hal yang dimaksud, yaitu untuk melindungi kemungkinan munculnya rasa egoisme terhadap organisasi pelaksana program yang bisa mempengaruhi hasil akhir yang berasal dari suatu implementasi. Keikutsertaan suatu organisasi terhadap implementasi sangat terikat terhadap input yang akan diterima dari hubungan inter organisasi secara timbal balik, serta saling terikat satu sama lain. Dengan adanya hal tersebut, proses implementasi kebijakan bisa dicapai di titik terbaik untuk merealisasikan terwujudnya kebutuhan serta kepentingan.

Pada tingkatan koordinasi bentuk hubungan antar organisasi sangat penting sehingga berpengaruh terhadap penentuan strategi suatu implementasi. Pengaturan suatu kebijakan publik bisa diterapkan melalui 2 atau lebih organisasi. karena, bagaimanapun, implementasi kebijakan sifatnya rumit, serta tantangan atas tindakan yang direncanakan lebih besar, sehingga kemungkinan untuk berhubungan secara khusus akan lebih rumit. Itulah sebabnya, kadangkala terjadi ‘kerumitan’ tadi menghasilkan perseteruan kebijakan terbengkelai (Rittel dan Webber,1973). Pemerintah belum mampu menerapkan kebijakan yang menyentuh akar perseteruan antara yang satu dengan lainnya. Katakanlah program pengentasan kemiskinan yang ditangani 2 atau lebih kementerian dibawah koordinasi Menko Kesra atau pada program PISEW yang melibatkan pemerintah pusat serta lokal, dengan menggunakan pengembangan administrasi serta operasional lintas organisasi.

Riset di beberapa negara Eropa menunjukkan pentingnya hubungan koordinasi antar organisasi diterapkan. Analisa (Kickert dan Koppenjam,1997; Rhodes, 1997; dan Schrap,1993), memberikan bukti pada suatu studi dokumen, yang sangat rumit dihadapi oleh organisasi serta pengurus di beberapa negara tertentu (lihat juga Klijn, 1996; Mayntz dan Scharpf, 1995). Beberapa sarjana sosial telah menunjukkan bahwa di negara-negara tersebut, para manajer diberikan jabatan untuk menghadapi tantangan agar termotivasi dalam mengembangkan aktivitas pada skala kecil melalui ikatan koordinasi antar organisasi yang luas (Hull dan Hjern,1987). Riset juga menunjukan secara substantif di Amerika Serikat, dimana programnya

dikembangkan melalui hubungan koordinasi antar organisasi (O'Toole dan Montjoy, 1984; Hall dan O'Toole, 2000). Begitu juga di level lokal, hubungan koordinasi antar organisasi juga sudah menjadi acuan (lihat Agranoff dan McGuire, 2003).

b. Perilaku birokrasi tingkat bawah (*Street Level bureaucratic behavior*).

Dimensinya yaitu : diskreasi.

Variabel berikutnya yang menjadi faktor kunci terhadap implementasi kebijakan ialah perilaku organisasi tingkat bawah. Hal ini dimaksudkan sebagai kemampuan untuk melaksanakan serta menjalankan berbagai program-program sebagai keputusan penting dengan menggunakan pengaruh yang lebih dominan diluar kewenangan formal (diskresi). Sehingga menurut Lipsky (1980) perilaku pelaksanaan kebijakan secara sistematis adakalanya ‘menyimpang’ dari tugas terkait dengan wewenang selaku pelaksana kebijakan. Mereka lebih mengutamakan hubungan dengan warga dalam penyampaian kebijakan. Sebab itu, organisasi tingkat bawah menjadi pemeran yang esensial dalam implementasi kebijakan publik, serta kinerjanya sangat konsisten dengan standar program yang bergantung terhadap kegiatannya (Lipsky, 1980).

Dalam pemikiran dasar Lipsky sangat berguna untuk mengetahui model implementasi ini, serta teorinya lebih khas terhadap mekanisme dalam memaparkan berbagai kebijakan serta konsekuensinya. Birokrat tingkat bawah bekerja pada lingkungan yang ditandai dengan beragam kebutuhan warga . Mereka berupaya mengatasi permasalahan serta membuat

pengutamaan kebijakan, mengawasi serta memodifikasi tujuan kebijakan sesuai dengan persepsi warga . Michael Lipsky (1980:3) mendeskripsikan birokrasi tingkat bawah ini sebagai “jabatan yang berkaitan langsung dengan rakyat”. Serta secara substansial, mereka mempunyai pertimbangan yang berkaitan dengan tugasnya masing-masing. Bahkan, berdasarkan posisinya di tengah warga itu, mereka mempunyai peluang lebih besar pada putusan kebijakan. Mereka bisa memberi pertimbangan, memanfaatkan pengaruh di luar kewenangan yang resmi, sebagaimana Lipsky menyebut bahwa pada implementasi kebijakan lebih dominan berasal dari berdampak pada pekerja tingkatan bawah ini.

Sementara itu, Vinzant dan Crothers (1998) berpikir lain. Alasannya adalah, pekerja tingkat bawah ini memilih prinsip terhadap pilihannya yaitu, hasil mana yang akan dicapai, serta bagaimana cara melakukannya. Dengan demikian Maynard-Moody dan Musheno (2003) melihat dari sisi lain yang sesuai dengan temuannya. ke 2 tokoh ini menunjukan bahwa pekerja inti yang dimaksud yaitu: tokoh warga , lembaga adat, penasihat serta semacamnya, yang selalu teratur dalam bekerjasama dengan birokrasi tingkat bawah. Mereka ini mengabdikan diri menjadi “warga negara yang membantu membangun serta melakukan pelayanan publik sesuai dengan norma yang berlaku”.

2. Sistem Informasi

a. Defenisi Sistem Informasi

Sistem merupakan sebuah deretan fungsi yang tiap fungsi mempunyai tugasnya masing-masing hingga bisa membantu kerja user akhir. Sistem bertujuan buat meringankan beban kinerja agar mengefisienkan saat kerja serta sampai membentuk kualitas kerja.

Definisi Sistem mempunyai banyak disparitas berdasarkan para ahlinya, Jerr (Rahmawati & Bachtiar, 2018) menyebutkan bahwa Sistem bisa didefinisikan menjadi sebuah jaringan kerja yg terdiri dari beberapa prosedur yg saling terkait, lalu bersama-sama melakukan/menyehlesaikan kegiatan hingga mencapai suatu target eksklusif. Sedangkan Robert (Rahmawati & Bachtiar, 2018) juga menyebutkan bahwa sistem terdiri dari beberapa elemen yg saling terintegrasi menggunakan saling memiliki tujuan yang sama buat mencapai target yg dibutuhkan. sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan elemen-elemen ataupun fungsi-fungsi yang tersusun dan terintegrasi menggunakan tujuan yang sama buat mencapai sebuah sasaran eksklusif.

Konsep dasar informasi menurut Gordon B. Darwís yaitu bahwa informasi sebagai sebuah data yang sudah dilakukan pengolahan menjadi suatu bentuk yang lebih berarti dan berguna bagi penggunanya dalam pengambilan keputusan baik untuk masa sekarang atau yang akan datang (Rahmawati & Bachtiar, 2018). Manfaat dari adanya informasi ini yaitu untuk mengurangi kesalahan dalam merogoh suatu keputusan, masalah

digunakan oleh semua pengguna adalah tidak hanya dipergunakan oleh satu orang saja, informasi yang bernilai bagi seorang ialah informasi yang berguna bagi dirinya. Meskipun ditujukan untuk seluruh orang, tetapi jika informasi tersebut tak diperlukan oleh orang tersebut maka informasi itu tidaklah bernilai atau bermanfaat, permasalahan tersebut bisa dikatakan sebagai sampah (Rahmawati & Bachtiar, 2018).

(Yakub, 2012) informasi yaitu suatu data yg diolah sebagai bentuk yang berguna serta lebih berguna bagi yang menerimanya. sistem informasi dapat diartikan menjadi elemen-elemen yang berkumpul yang saling bekerjasama satu dengan yang lain dan membentuk suatu ketentuan untuk menyimpan dan memproses data berita. informasi juga ialah data yang sudah diolah menjadi suatu bentuk yang memiliki arti sangat berguna bagi insan (Husein, 2014).

Sistem informasi artinya suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan aktivitas strategi dari suatu organisasi serta menyediakan pihak luar tertentu menggunakan laporan- laporan yang diharapkan (Hutahaean, 2014).

Menurut (Jogiyanto, 2009) "Sistem informasi dapat didefinisikan menjadi suatu sistem didalam suatu organisasi adalah kombinasi berasal dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur-mekanisme, dan pengendalian yang ditujukan untuk menerima jalur komunikasi penting, memproses tipe transaksi rutin tertentu, memberi frekuensi kepada manajemen serta yang

lainnya terhadap kejadian-kejadian internal serta eksternal yang penting dan menyediakan suatu dasar informasi untuk pengambilan informasi yang cerdik”.

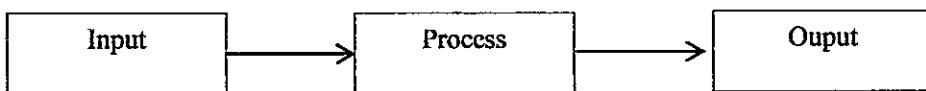
Menurut (O'Brien, 2006) sistem informasi artinya suatu kombinasi antara orang-orang serta perangkat yang terdapat pada komputer seperti aplikasi, perangkat keras, dan sebagainya. berdasarkan penjelasan tersebut bahwa sistem informasi merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan orang untuk mengakses data di perangkat yang ada pada komputer seperti software dan keras.

b. Model Sistem Informasi

Menurut Mulyanto (2009) sistem informasi adalah suatu komponen yang terdiri dari manusia, teknologi informasi, dan prosedur kerja yang memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk mencapai tujuan perusahaan.

- a. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang masuk dan menjadi bahan yang diproses. Masukan dalam hal ini berupa data mentah (raw data).
- b. Proses merupakan bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran yang berguna dan lebih bernilai, dalam hal ini berupa informasi.
- c. Keluaran (output) merupakan hasil temuan/olahan dari proses. Pada sebuah Sistem Informasi, keluaran bisa berupa suatu informasi, saran, laporan, dan lain sebagainya.

Gambar 2.5 Skema Sistem Informasi



c. Kriteria Sistem Informasi

Ralph, et al. dalam (Rahayu & Anggadini, 2014) menyatakan bahwa sistem informasi yang berkualitas biasanya memenuhi kriteria mirip fleksibel, efisien, praktis diakses serta sempurna saat. Selanjutnya Laudon, et al. dalam (Rahayu & Anggadini, 2014) menambahkan bahwa sistem informasi berkualitas memadukan efisiensi teknis dengan kepekaan terhadap kebutuhan organisasi serta insan mengakibatkan kepuasan yang lebih tinggi serta produktivitas.

d. Tujuan Sistem Informasi

Sistem informasi menurut Rustiyanto dalam Kaka, (2021) memiliki tujuan sebagai:

- 1)Menyediakan informasi yang dipergunakan didalam perhitungan harga pokok jasa, produk dan tujuan lainnya yang diinginkan manajemen
- 2)Menyediakan informasi yang digunakan pada perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, serta pemugaran berkelanjutan
- 3)Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan sistem informasi

Berdasarkan pembagian tersebut bahwa sistem informasi adalah penyampaian informasi yang digunakan dalam proses hitungan harga awal

yang berguna dan menghasilkan tujuan yang diinginkan oleh pengelola, informasi yang disediakan dan pergunakan untuk perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan lanjutan dan penyediaan informasi untuk mengambil kesimpulan dari sistem informasi.

2. Website

a. Defenisi Website

World Wide Web atau WEB ialah salah satu layanan yang didapat oleh pengguna komputer yang terhubung ke internet. Website merupakan sebutan bagi sekelompok laman web (webpage) yang biasanya diartikan sebagai bagian yang berasal dari suatu nama domain atau subdomain pada WWW di internet.

Website pula bersifat tidak aktif juga bergerak maju yang membuat 1 rangkaian bangunan dan saling terkait, dimana masing-masing dihubungkan menggunakan jaringan (hyperlink). Bersifat tidak aktif jika isi infomasi permanen, sporadis berubah serta informasinya searah hanya asal pemilik website. Bersifat bergerak maju jika isi berita website selalu berubah-ubah. Situs website yang mempunyai fungsi informasi biasanya lebih menekankan kualitas pada bagian kontennya, sebab tujuan situs tersebut ialah memberikan isinya .

Berdasarkan Yuhefizar dalam (Krisnayani et al. 2016), web merupakan suatu metode untuk menampilkan informasi pada internet, baik berupa teks, gambar, bunyi dan juga video yang interaktif serta memiliki kelebihan

untuk menghubungkan (link) satu dokumen menggunakan dokumen lainnya (hypertext) yang bisa diakses melalui sebuah browser.

1. Karakteristik Website

Karakteristik website didefinisikan sebagai atribut yang dipertimbangkan konsumen dalam melakukan penilaian pada website suatu toko online.

Karakteristik website diukur menggunakan lima dimensi Rahadi, (Anggraeni dan Irviani, 2019) yaitu :

- a) Kenyamanan mendapatkan informasi. Dalam mendapatkan informasi melalui media online, pemerintah mengharapkan bahwa proses mendapatkan informasi akan memperoleh kemudahan. Kemudahan tersebut akan menyebabkan masyarakat merasa nyaman dengan penggunaan suatu situs atau web tersebut.
- b) Desain situs. Situs dengan desain yang menarik akan lebih disukai pengunjung website. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolah harus mampu mendesain website dengan lebih menarik.
- c) Informatif. Informasi yang disajikan dalam suatu website harus mampu memberikan informasi secara detail tentang keunggulan yang ada.
- d) Keamanan. Pada saat pengaksesan website terdapat tampilan layanan yang disediakan secara khusus untuk masyarakat dan pemerintah desa sehingga terdapat kerahasiaan identitas.
- e) Komunikasi. Dalam proses pengaksesan,masyarakat terkadang membutuhkan informasi secara langsung dengan dengan pengelolah.

Berdasarkan hal tersebut maka nomor telepon serta sosial media pemerintah desa yang bertugas sebaiknya mudah untuk dihubungi.

c. Manfaat dan Fungsi Website

Website merupakan alamat atau lokasi didalam internet suatu halaman web, umumnya membuat dokumen HTML dan dapat berisi sejumlah foto atau gambar grafis, musik, teks bahkan gambar yang bergerak. Dengan menggunakan teknologi tersebut, informasi dapat diakses selama 24 jam dalam satu hari dan dikelola oleh mesin, atau bisa diartikan website adalah keseluruhan kumpulan halaman web dan informasi seperti gambar-gambar, suara, file video dan lain-lain yang disediakan bagi pengguna dalam sebuah web server.

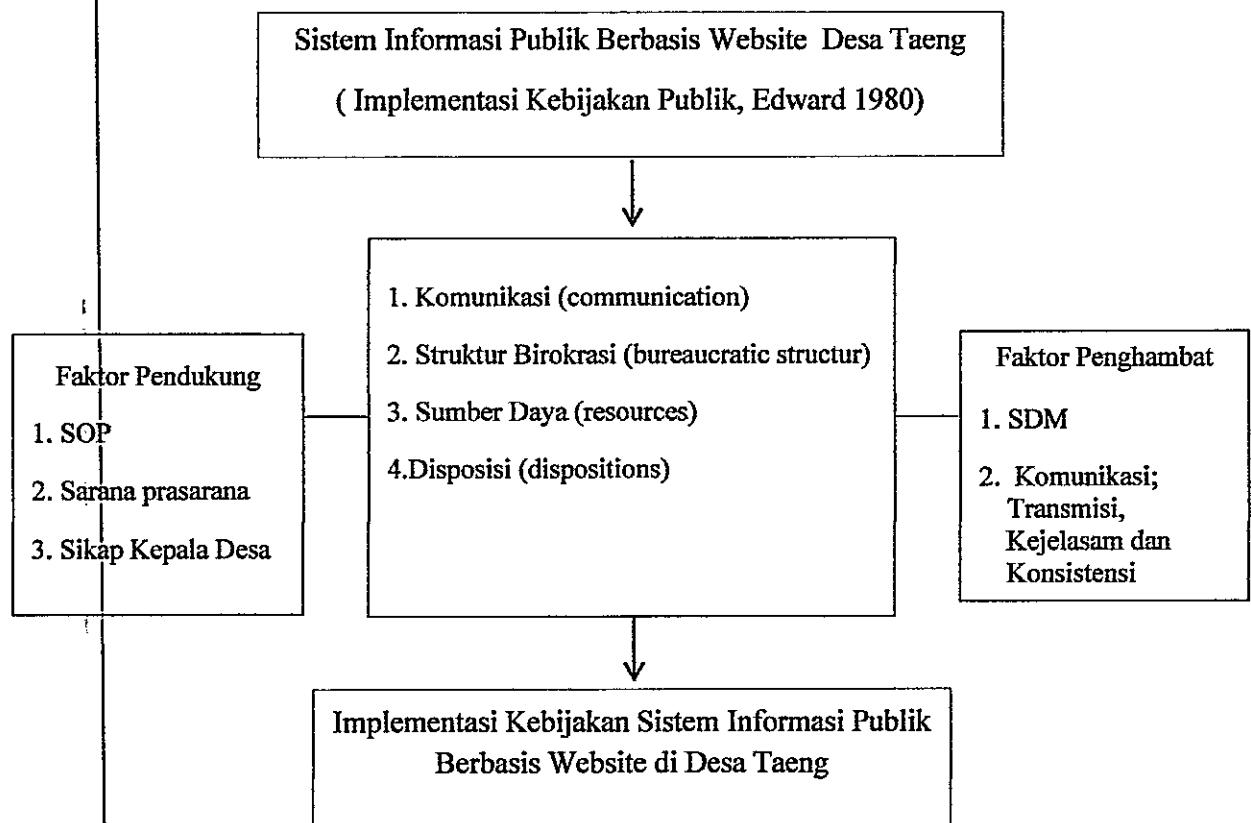
Situs web dapat memberikan keuntungan besar karena ia dapat diakses secara global melalui jaringan internet, informasi tentang produk tersedia secara online dan dapat menjawab pertanyaan dari konsumen dengan cepat dan murah, pada umumnya situs web menyediakan beberapa artikel beserta tips dan informasi. Ketika suatu situs web sering update dan memposting artikel, masyarakat umum dapat menggunakannya sebagai sumber informasi. Dengan ini masyarakat dapat melihat produk dan jasa yang ditawarkan dalam situs web tersebut, informasi tentang bisnis dan perusahaan dapat diposting dalam situs web, dengan ini kita mendapatkan kepercayaan dari konsumen, karena konsumen lebih percaya jika mereka mengetahui sesuatu tentang perusahaan tersebut (MZ, 2016).

C. Kerangka Pikir

Penelitian ini dilakukan di **Kantor Desa Taeng** untuk mengetahui implementasi sistem informasi publik berbasis website yang ada di desa taeng dimana dalam penerapan sistem informasi berbasis website ini masih terdapat beberapa permasalahan terdapat pada pengelolah atau operator yang bertugas dalam pelayanan berbasis webssite ini belum memperbarui data-data yang ada pada tampilan website tersebut (data-data pada tampilan website masih data tahun 2019), mulai dari profil desa, data desa, informasi publik dan sebagainya. Adapun kendala lainnya yaitu masyarakat kurang berpartisipasi dalam mengakses sistem informasi berbasis website tersebut.

Penelitian tentang implementasi sistem informasi publik berbasis website di Kantor Desa Taeng ini akan di analisis berdasarkan indikator yang dikemukakan oleh George Edward III (1980) yaitu: (1) komunikasi, (2)struktur birokrasi, (3) sumber daya; Disposisi.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi Kantor Desa Taeng agar implementasi sistem informasi publik berbasis website ini dapat diterapkan dengan baik. Berdasarkan Uraian yang telah di atas mendasari lahirnya kerangka pikir penelitian seperti pada Gambar.



Gambar 2.6 Kerangka Pikir

D. Fokus penelitian

Fokus penelitian ini adalah “Implementasi Sistem Informasi Desa Berbasis Website di Desa Taeng”, yaitu Komunikasi, Struktur Birokrasi, Sumber Daya, Disposisi. Sistem informasi Berbasis Website di Desa Taeng ini dapat mempermudah pemerintah desa dalam melayani masyarakat dan juga mempermudah masyarakat mendapatkan informasi dimana pun dan kapan pun asal terhubung dengan internet, serta dapat dengan mudah mengakses layanan yang telah di berikan oleh pemerintah desa.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Adapun sub-sub fokus dari fokus penelitian Implementasi Sistem Informasi Publik Berbasis Website di Kantor Desa Taeng adalah :

1. Komunikasi

Komunikasi implementasi sistem informasi publik berbasis website didesa taeng yaitu tolak ukur seberapa jauh kebijakan dalam bentuk peraturan yang telah di sampaikan secara jelas dengan interpretasi yang sama dan dapat dilakukan secara konsisten dengan operator pelaksana peraturan yang terdiri dari : a) Transmisi, b) Kejelasan, dan c) Konsistensi.

2. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi dalam implementasi sistem informasi publik berbasis website didesa taeng terdapat dua karakteristik utama yaitu : a) SOP (standar operasional prosedur),yang dimaksud dalam SOP adalah petunjuk pelaksanaan/ apakah SOP ini menghalangi/ menyulitkan pemerintah desa dalam mejalankan. b) Fragmentasi, yang dimaksud adalah penyebaran

tanggung jawab dalam pelaksanaan fungsi yang melibatkan unit diluar organisasi.

3. Sumber daya

Sumber daya terdiri dari : a) Kecukupan dan kualifikasi, yang dimaksud adalah Sumber daya manusia memiliki jumlah yang cukup dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan kebijakan. b) Sarana prasarana yang dimaksud adalah segala jenis perlengkapan, peralatan kerja juga fasilitas yang memiliki fungsi sebagai pembantu atau alat utama untuk melaksanakan suatu pekerjaan.

4. Disposisi

Disposisi memiliki sikap dan pelaksana kebijakan yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan yang sesuai dengan keinginan pelaksana agar tidak terjadi bias akan tetapi jika sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana sesuai yang direncanakan.

BAB III **METODE PENELITIAN**

A. Waktu dan Lokasi

Waktu penelitian yang dibutuhkan pada penelitian ini kurang lebih selama 2 (dua) bulan, mulai dari bulan April sampai bulan Juni tahun 2022. Lokasi penelitian berada di Desa Taeng karena peneliti melihat di Desa Taeng ini sudah menerapkan Sistem Informasi Publik secara online dengan menggunakan Website, penelitian ini dilakukan di kantor Desa Taeng.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dalam bentuk narasi. Dalam penelitian ini memfokuskan pada Implementasi Sistem Informasi Publik Berbasis Websitedi Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian deskriptif, hasil penelitian akan mendeskripsikan secara rinci kondisi atau fenomena sosial yang terjadi.

C. Informan

Informan penelitian ini akan diwawancara untuk mendapatkan jawaban yang berkaitan dengan "Implementasi Sistem Informasi Publik Berbasis Website di Desa Taeng" Adapun informan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1 Informan

No.	Nama	Inisial	Jabatan
1.	H. NurdinYasin	HN	Kepala Desa/ Plt. Kepala Dusun gantarang
2.	Muh. Kasim, SH	MK	Sekertaris Desa/Operator Website
3.	Mulya Hamzah Dg. Lawa	MH	Kepala Dusun taeng
5.	Hamdana	HD	Masyarakat
6.	Ilham	IM	Masyarakat
7.	Aliyah	AH	Masyarakat

Dengan informan tersebut diharapkan dapat semaksimal mungkin dalam memberikan informasi kepada peneliti agar dapat digali seakurat mungkin. Dalam teknik penentuan informan peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *Purposive Sampling*, artinya teknik penentuan sumber data mempertimbangkan terlebih dahulu, bukan diacak. Ialah memilih informan sinkron menggunakan kriteria terpilih yang relevan menggunakan duduk perkara penelitian. Untuk mendapatkan

informasi yang akurat, peneliti menentukan informan, yakni Kepala Desa Taeng, Staff Kantor Desa Taeng dan Tokoh Masyarakat, sebagai pelaku dalam munculnya kebijakan ini, serta dilengkapi data dari tanggapan beberapa tokoh masyarakat.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, menggunakan:

- (1) Wawancara; (2) Dokumentasi; (3) Observasi.

1. Wawancara

Dilakukan guna memperoleh data primer tentang Implementasi Sistem Informasi Publik Berbasis Website yang ada di Desa Taeng kepada informan yaitu Kepala Desa, Operator website dan Tokoh masyarakat untuk mendapatkan data serta informasi yang akurat dan mendalam.

2. Dokumentasi

Dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara melakukan kajian terhadap data-data dokumen pribadi dan dokumen resmi, baik visual maupun berupa tulisan yang berkaitan dengan masalah penelitian Implementasi Sistem Informasi Publik Berbasis Website di Desa Taeng

3. Observasi

Melakukan pengamatan pribadi di Kantor Desa Taeng dan juga website desa taeng yang dilakukan secara berulang terhadap suatu objek pengamatan di kawasan yang sama ataupun berbeda. Observasi difokuskan pada pengamatan langsung terhadap Desa Taeng.

E. Teknik Pengabsahan Data

Teknik pengabsahan data memuat teknik untuk pengabsahan data penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal) yaitu mengukur apakah hasil penelitian dari berbagai perspektif subyek dapat dipercaya, *transferability* (validitas eksternal) yaitu berkaitan dengan hasil penelitian dapat ditransfer atau digunakan pada konteks lain atau konteks yang lebih spesifik, *dependability* (reliabilitas) yaitu berkaitan dengan apakah hasil penelitian dapat diulangi lagi, dan *confirmability* (obyektifitas) yaitu bagaimana hasil penelitian itu dapat dibenarkan oleh yang lain.

F. Teknik Analisis Data

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang merangkum, menentukan data-data pokok, memusatkan pada poin-poin yang penting, mencari tema dan pola data. Cara reduksi data yaitu seleksi keatas atas data, ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam pola yang lebih luas.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah rangkaian kegiatan informasi yang disusun, sehingga dapat menarik kesimpulan dan dapat mengambil tindakan. Gambaran penyajian data kualitatif yaitu teks naratif: berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan Kesimpulan yaitu dengan mendeskripsikan serta memverifikasi data yang akan memberikan pandangan kualitatif, setelah itu menarik kesimpulan dari data tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang dilakukan terkait judul Implementasi Sistem Informasi Publik Berbasis Website di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Peneliti juga akan memaparkan Profil lokasi penelitiannya. Pada bab IV ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang dilakukan terkait judul Implementasi Sistem Informasi Publik Berbasis Website di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Peneliti juga akan memaparkan Profil lokasi penelitiannya.

A. Deskripsi Objek Peneltian

1. Letak Geografis Desa Taeng

Pada awalnya Desa Taeng merupakan sebuah dusun dalam wilayah Desa Bontoala yang terletak di sebelah utara berbatas dengan sungai Je'neberang. Pada saat itu Desa Bontoala adalah sebuah desa yang cukup luas, walaupun telah mengalami beberapa pemekaran. Dusun Taeng pada saat itu merupakan pusat pemerintahan desa karena kantor desa berada di dusun Taeng.

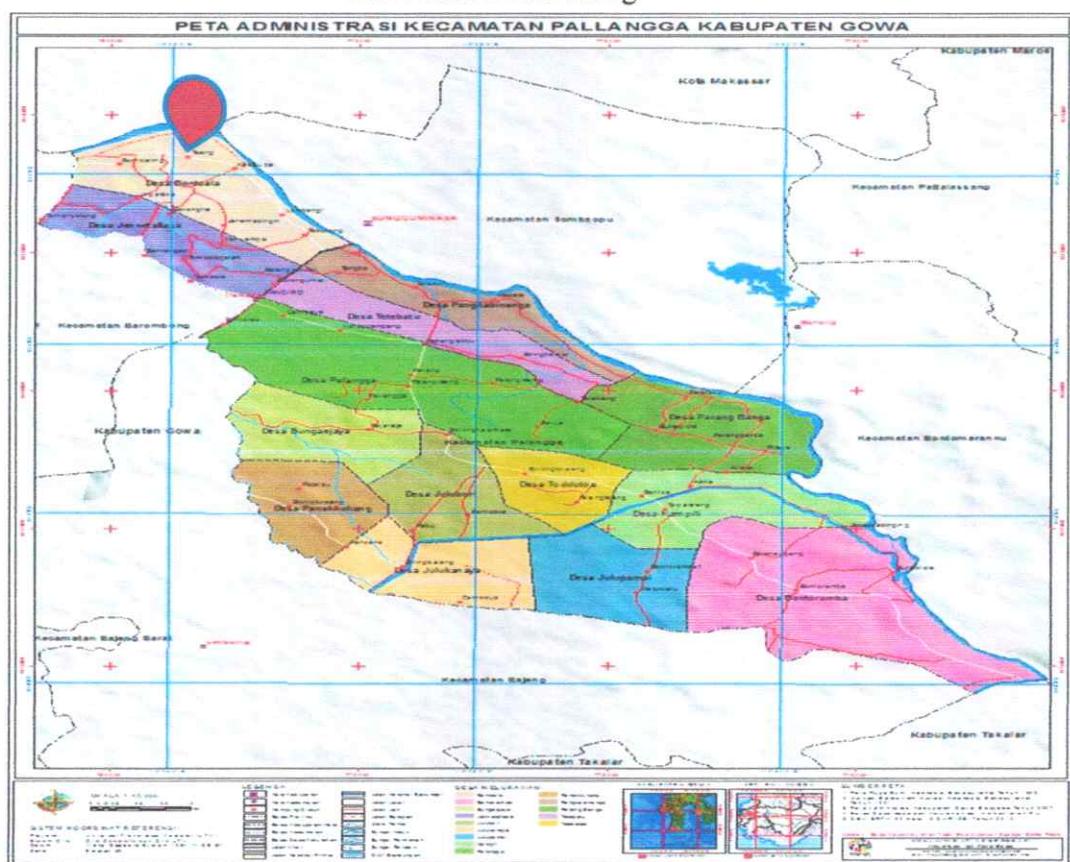
Namun setelah kepemimpinan Abd. Rahim Alauddin Kr. Kulle berakhir dan dilanjutkan oleh Sangkala Dg. Ngawing sebagai Kepala Desa terpilih pada saat itu, maka pusat pemerintahan desa Bontoala berpindah keBontomajannang, dengan membangun kantor desa baru. Setelah kepemimpinan Sangkala Dg. Ngawing berjalan beberapa tahun muncullah

gagasan dari para tokoh pemuda dan tokoh masyarakat untuk membentuk desa tersendiri.

Setelah melalui beberapa proses maka pada tahun 1999 berdirilah sebuah desa baru dari hasil pemekaran Desa Bontoala dan disepakatilah Taeng sebagai nama desa baru tersebut. Sebagai Kepala Desa Persiapan yang baru maka ditunjuklah AR. Yasin Alauddin Kr. Ngaseng sebagai Kepala Desa Persiapan Taeng, dan hanya berjalan ±1 tahun, disebabkan beliau wafat pada tahun 2000. Sebagai pelaksana tugas dalam kekosongan pada saat itu, maka Sekretaris Desa mengambil alih segala tugas-tugas kepala desa sampai tahun 2001.

Berdasarkan hasil musyawarah LKMD Desa Bontoala, maka disepakatilah Nurdin Yasin sebagai Kepala Desa Persiapan Taeng pada tahun 2001. Selanjutnya pada tahun 2007 Desa Persiapan Taeng menjadi desa Defenitif dan sekaligus pemilihan Kepala Desa I dan Nurdin Yasin Dg. Nyikko sebagai kepala Desa Taeng.

Gambar 4.1
Peta Lokasi Desa Taeng



Desa Taeng adalah salah satu desa di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Orbitasi dan waktu tempuh dari ibukota Kecamatan ± 3 km dengan waktu tempuh 5 menit dan dari ibukota kabupaten 4 km dengan waktu tempuh 7 menit.

Batas-batas administratif pemerintahan Desa Taeng Kecamatan Pallangga sebagai berikut :

Batas Wilayah :

Utara : Sungai Je'neberang

Selatan : Desa Kanjilo Kec. Barombong

Barat : Desa Tamannyeleng Kec. Barombong

Timur : Desa Bontoala

Dilihat dari topografinya dan kontur tanah, Desa Taeng secara umum berupa daerah datar yang berada pada ketinggian ± 4 m di atas permukaan laut (sebagai areal pemukiman, persawahan, perkebunan), dengan luas wilayah 2,27 Km². Sedangkan letak koordinat Desa Taeng 5°11' 46,52" LS 119° 26' 02.09" BT, dengan kemiringan 2–5 °.

Secara administrasi Desa Taeng terdiri dari 2 Dusun, yakni Dusun Taeng dan Dusun Gantarang. Untuk Dusun Taeng terdiri dari 8 RW dan 20 RT sedangkan dan Dusun Gantarang terdiri dari 7 RW dan 18 RT.

2. Gambaran Umum Desa Taeng

a. Profil Kantor

Nama : Kantor Desa Taeng

Alamat : Desa Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa, Katangka,
Sulawesi Selatan, Indonesia 92161

Sosial Media: facebook.com/178754126041676

Website : <https://demosid.karyabangun.co.id/>

b. Pemerintahan Desa

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kepala Desa mempunyai fungsi :

- 1) Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- 2) Mengajukan rancangan Peraturan Desa

- 3) Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- 4) Membina kehidupan masyarakat Desa
- 5) Membina Perekonomian Desa
- 6) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif

Tabel 4.1 Struktur Pemerintahan

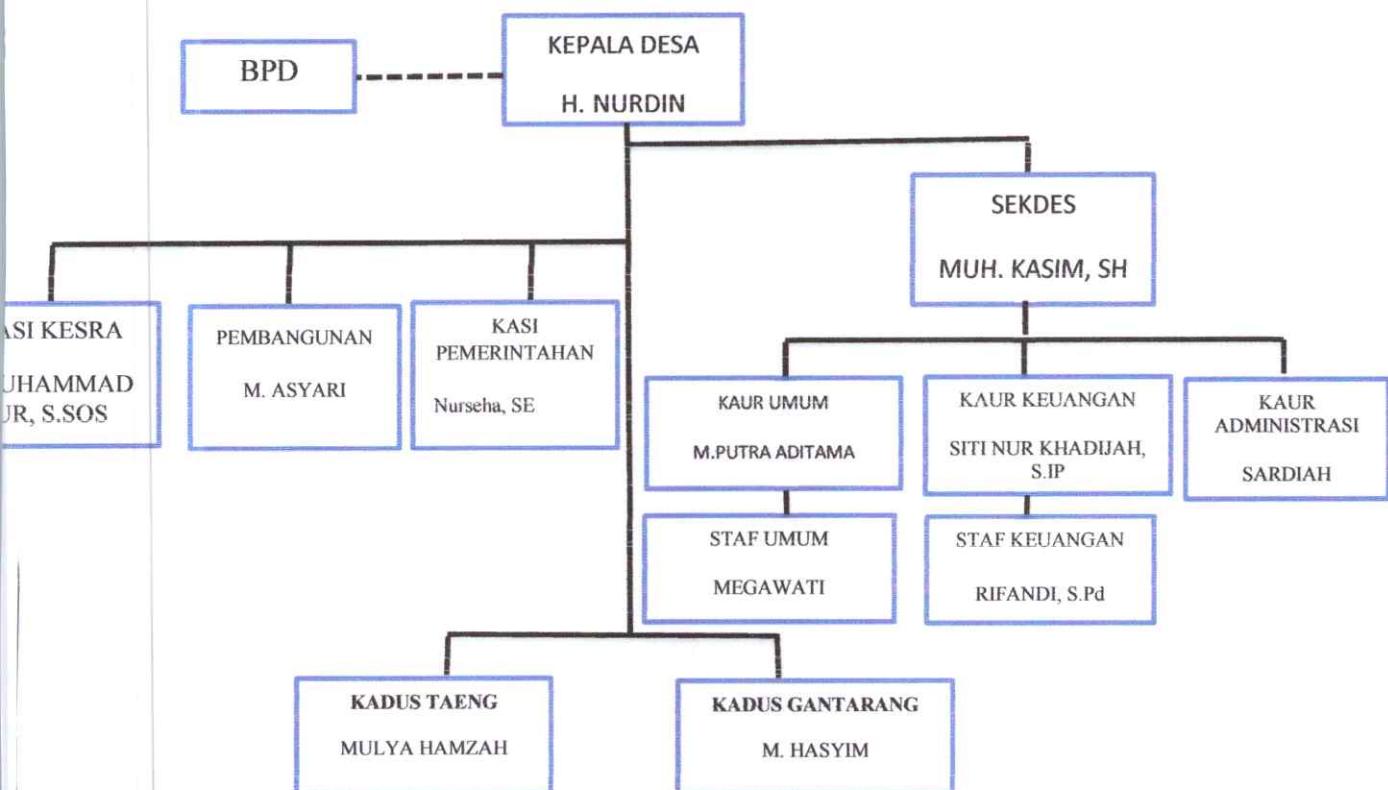
No	Nama	Jabatan
1	H. Nurdin Yasin	Kepala Desa
2	Muh. Kasim, SH	Sekretaris Desa
3	M. Putra Aditama	Kaur Umum
4	Nurseha, SE	Kasi Pemerintahan
5	Muhammad Nur, S.Sos	Kasi Kesra
6	Siti Nur Khadijah,. S.IP	Kaur Keuangan
7	Sardiah	Kaur Administrasi
8	Muh. Asyari	Kasi Pembangunan
9	Rifandi, S.Pd	Staf Keuangan
10	Megawati	Staf Administrasi
11	Mulya Hamzah	Kadus Taeng
12	M. Hasjim	Kadus Gantarang

Pusat Pemerintahan Desa Taeng bertempat di Dusun Taeng, dan telah memiliki gedung Kantor dan aula pertemuan. Namun lahan yang dipakai statusnya masih hak pakai, sehingga untuk merenovasi bangunan kantor terkendala dalam hal staus tanah yang ditempati. Di kantor desa Taeng telah dilengkapi dengan mobiler berupa meja, kursi, lemari , papan potensi, dan komputer.

Pelayanan ke Masyarakat dilaksanakan setiap hari jam kerja kadang kala ada juga penduduk yang datang pada sore atau malam hari. Namun masih perlu peningkatan kapasitas SDM. Peningkatan kapasitas yang dimaksud adalah menyangkut tugas dan fungsinya masing-masing antara lain : keterampilan adminitrasi, pengoperasian komputer, dan teknik pelayanan tugas kepada masyarakat.

PEMERINTAH DESA TAENG KECAMATAN PALLANGGA

KABUPATEN GOWA



Gambar 4.2 Bagan Struktur Organisasi dan Tata kerja

c. Tugas Pokok dan Fungsi

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Pemerintahan Desa Taeng berjalan dengan baik sesuai yang telah diatur dalam Peraturan Desa taeng tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa. Semua pelaksanaan kegiatan pemerintahan sesuai aturan yang berlaku, dari Aparatur Pemerintah Desa hingga ke RT/RW berjalan dengan baik, begitu juga dengan Lembaga-lembaga Desa taeng yang ada.

Tugas Pokok Dan Fungsi

Bagian I

Kepala Desa

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 - (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana

- prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
- c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
 - d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
 - e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

Bagian II

Sekertaris Desa

1. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
2. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyelenggaraan rapat,

pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya
- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- e. Melaksanakan buku administrasi desa sesuai dengan bidang tugas Sekretaris Desa atau sesuai dengan Keputusan Kepala Desa.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Pemerintah yang lebih tinggi

Bagian III

Kepala Urusan Umum

- 1. Kepala urusan umum berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- 2. Kepala urusan umum bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- 3. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- 4. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan umum mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas;

- b. Melaksanakan administrasi surat menyurat;
- c. Melaksanakan arsiparis dan ekspedisi pemerintahan desa;
- d. Melaksanakan penataan administrasi Perangkat Desa; Penyediaan prasarana Perangkat Desa dan Kantor;
- e. Penyiapan rapat-rapat; Pengadministrasian aset desa;
- f. Pengadministrasian inventarisasi desa;
- g. Pengadministrasian perjalanan dinas;
- h. Melaksanakan pelayanan umum

Bagian IV

Kepala Urusan Keuangan

- 1. Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- 2. Kepala urusan perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- 3. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- 4. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan perencanaan mempunyai fungsi:
 - a. Mengkoordinasikan urusan perencanaan Desa;
 - b. Menyusun RAPBDes;
 - c. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan Desa;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi program Pemerintahan Desa;

- e. Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa);
- f. Menyusun laporan kegiatan Desa;
- g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian V

Kepala Urusan Perencanaan

- 1. Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- 2. Kepala urusan perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- 3. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- 4. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan perencanaan mempunyai fungsi:
 - a. Mengkoordinasikan urusan perencanaan Desa;
 - b. Menyusun RAPBDes;
 - c. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan Desa;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi program Pemerintahan Desa;
 - e. Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa);
 - f. Menyusun laporan kegiatan Desa;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

Bagian VI

Kepala Urusan Pemerintahan

1. Kepala seksi pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang pemerintahan.
2. Kepala seksi pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan.
3. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi pemerintahan mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan Desa;
 - b. Menyusun rancangan regulasi desa;
 - c. Melaksanakan pembinaan masalah pertanahan;
 - d. Melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - e. Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat Desa;
 - f. Melaksanakan pembinaan masalah pendudukan;
 - g. Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah Desa;
 - h. Melaksanakan pendataan dan pengelolaan Profil Desa;
 - i. Melakukan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian VII

Kepala Urusan Kesejahteraan

1. Kepala seksi kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang kesejahteraan.

2. Kepala seksi kesejahteraan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang kesejahteraan .
3. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi kesejahteraan mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang sosial budaya;
 - b. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang ekonomi;
 - c. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang politik;
 - d. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang lingkungan hidup;
 - e. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemberdayaan keluarga;
 - f. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemuda, olah raga dan karang taruna;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

Bagian VII

Kepala Urusan Pelayanan

1. Kepala seksi pelayanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang kesejahteraan.
2. Kepala seksi pelayanan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pelayanan.

3. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi pelayanan mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat Desa;
 - b. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat Desa;
 - c. Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - d. Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya, keagamaan dan ketenagakerjaan masyarakat Desa;
 - e. Melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk;
 - f. Melaksanakan pekerjaan teknis urusan kelahiran dan kematian;
 - g. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan;
 - h. Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan;
 - i. Melaksanakan pembangunan bidang Kesehatan

1. Kepala seksi pelayanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang kesejahteraan.
2. Kepala seksi pelayanan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pelayanan.
3. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi pelayanan mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat Desa;
 - b. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat Desa;
 - c. Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat Desa;

- d. Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya, keagamaan dan ketenagakerjaan masyarakat Desa;
- e. Melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk;
- f. Melaksanakan pekerjaan teknis urusan kelahiran dan kematian;
- g. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan;
- h. Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan;
- i. Melaksanakan pembangunan bidang Kesehatan.

Bagian IX

Kepala Dusun

- 1. Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dusun memiliki fungsi:
 - a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
 - c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
 - d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

3. Program Sistem Informasi Publik Berbasis Website di Desa Taeng

Sistem Informasi Publik Berbasis Website di Desa Taeng ini bertujuan untuk membuka potensi yang ada di wilayah Desa Taeng. Potensi-potensi tersebut akan sangat efektif untuk dipublikasikan, dimungkinkan dapat berkembang dengan adanya sistem informasi publik berbasis website ini, sehingga pemerintah desa dengan mudah menyampaikan informasi.

Di dalam sistem informasi desa juga terdapat beberapa informasi yang berkaitan dengan profil desa baik luas wilayah, maupun jumlah penduduk yang ada. Data-data tersebut telah tercover didalam sistem informasi berbasis website, sehingga memudahkan pemerintah desa dalam pendataan apabila dibutuhkan. Selain itu sistem informasi ini juga digunakan sebagai sarana informasi pemerintah desa kepada masyarakat terkait dengan penggunaan anggaran atau bisa disebut sebagai transparansi anggaran. Sarana ini digunakan agar masyarakat bisa ikut mengawasi setiap penggunaan anggaran, apakah sudah sesuai dengan fakta dilapangan. Sistem informasi desa dirancang untuk memberikan informasi yang cepat dan tepat. Serta masyarakat dapat mengetahui agenda-agenda apa saja yang dilakukan oleh pemerintah desa dan dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Fungsi selanjutnya dari sistem informasi desa adalah fungsi keterbukaan informasi secara online (website). Keterbukaan informasi berbasis website saat ini memang dibutuhkan dengan kondisi jumlah masyarakat besar, sehingga kebijakan ini dirasa sangat efektif untuk memudahkan pemerintah desa dalam melayani masyarakat. Selain itu

masyarakat juga sangat diuntungkan dengan kebijakan ini, karena masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi desa yang diperlukan. Masyarakat sangat terbantu dengan program ini, karena masyarakat desa taeng mayoritas pelajar/mahasiswa serta pegawai yang hampir tidak ada waktu datang kekantor desa untuk mengurus segala keperluan di kantor desa.

Namun ada beberapa masalah yang muncul dalam penerapan program ini. yakni belum ada operator khusus yang menjalankan website tersebut sehingga berdampak pada pelayanan yang seharusnya berdampak pada lancarnya sistem keterbukaan informasi menjadi terhambat dan kurang optimal.

Masalah selanjutnya adalah masih belum lengkapnya data base masyarakat. Dengan data base masyarakat yang belum optimal, juga akan berpengaruh kepada system informasi yang akan ditampilkan, terkait dengan aspek kependudukan.

Dalam rangka pembangunan infrastruktur Desa taeng untuk menunjang sarana keterbukaan informasi desa berbasis website. Serta kegiatan pembangunan-pembangunan yang lain untuk menuju desa mandiri dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa. diperlukan partisipasi dari seluruh masyarakat melalui pembangunan skala desa. Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, diperlukan kontribusi untuk menjaga ataupun membangun sarana dan prasarana desa.

Semua elemen baik itu dari pemerintah desa maupun dari masyarakat, semua terlibat dalam pembangunan infrastruktur yang ada. Sehingga dapat

menjaga sarana yang telah disediakan oleh pemerintah desa. Didalam program desa, sistem informasi pemerintah membuka seluas-luasnya kepada masyarakat taeng untuk melihat keuangan desa, sehingga masyarakat dapat mengawasi penggunaan dana-dana yang ada. Dengan dipublikasikannya pendanaan desa, merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap masyarakat, serta bentuk transparansi anggaran.

Beberapa yang telah di publikasikan di website desa adalah, Sumber utama dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Taeng masih mengandalkan berasal dari dana transfer baik yang berasal dari pusat atau dari kabupaten, Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil dan Retribusi. Sehingga berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan Desa taeng dalam melayani masyarakat desa diharapkan lebih optimal sesuai kewenangannya.

Profil Tampilan Sistem Informasi Publik Berbasis Website di Desa Taeng, Klik link website <https://demosid.karyabangun.co.id/>, Muncul tampilan awal yang terdiri dari profil desa, pemerintahan desa, data desa, produk hukum, informasi publik, tokoh online, PPOB, Ticketing. Selanjutnya Artikel desa taeng untuk mendapatkan informasi mengenai berita di desa taeng klik selengkapnya maka akan muncul salah satunya TRIBUN-TIMUR.COM, SUNGGUMINASA - Tumpukan sampah menggunung di Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Jumat (4/1/2019). Ratusan bungkusan plastik bekas bertebaran sepanjang 100 meter di tepi Jl. Perumahan Permata Permai Zahra. Yang ditulis oleh Ari Maryadi, Editor Suryana Anas.

Selanjutnya terdiri dari wilayah desa yang menampilkan peta desa taeng, kemudian ada kategori yang terdiri dari Berita desa (berita lokal dan berita kriminal), program kerja, panduan layanan desa, peraturan desa. Selanjutnya Layanan mandiri untuk mengakses layanan ini membutuhkan Nik dan Pin, untuk mendapatkan pin diharuskan menghubungi operator desa untuk mendapatkan pin sedangkan untuk Nik memasukan nik masyarakat desa taeng yang akan menerima pelayanan.

Tampilan selanjutnya yaitu sinergi program, agenda, galeri foto, statistik desa taeng (statistik jumlah penduduk), Komentar terkini, info sosial media, lokasi kantor desa, statistik jumlah pengunjung (hari ini 13, Kemarin 18, jumlah pengunjung 6095), Arsip artikel (terkini, populer, acak), terakhir tampilan pengeluaran desa taeng terlampir APBDes 2019 pelaksanaan (pendapatan 64,36%, 46,13%), APBDes 2019 Pendapatan (hasil usaha desa 0%, hasil aset desa 0%, Swadaya, partisipasi dan gotong royong 0%, dana desa 60%, Bagi hasil pajak dan retribusi 100%, alokassi dana desa 57,94%, Bantuan Keuangan provinsi 0%), APBDes 2019 Pembelanjaan (bidang penyelenggaraan pemerintahan desa 66,55%, bidang pelaksanaan pembangunan desa 28,47%, bidang pembinaan kemasyarakatan 67,78%, bidang pemberdayaan masyarakat 100%, bidang penanggulangan bencana, darurat mendesak desa 0%).

B. Hasil Penelitian

1. Implementasi Sistem Informasi Publik Berbasis Website di Desa Taeng

Dalam Implementasi Sistem Informasi Publik Berbasis Website di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa menggunakan teori Edward, (1980) Komunikasi, Sumber Daya, Struktur Birokrasi dan Disposisi :

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan yang nantinya informasi tersebut akan disampaikan kepada kelompok sasaran untuk mendapatkan respon dari pihak-pihak terkait. Komunikasi terdiri dari 3 bagian yaitu:

1) Transmisi/ Penyaluran komunikasi

Komunikasi transmisi yang dimaksud dalam Sistem Informasi berbasis Website di desa Taeng. Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Informan 1 dan informan 2 :

“Pemerintah desa memberikan informasi berupa dokumentasi mengenai kegiatan pemerintah desa yang dilakukan di desa taeng dengan cara menampilkan kegiatan-kegiatan tersebut di website desa taeng”(Hasil Wawancara peneliti dengan bapak H.Nurdin yasin tanggal 30 Mei 2022).

“Data kegiatan diolah dulu. setelah diolah dan dijadikan berita, kemudian diupload ke website. Nah, dari website tersebut masyarakat dapat melihat informasi berupa berita maupun kegiatan pemerintah desa. Karna website desa ini di adakan untuk mempermudah menyampaikan informasi mengenai desa kepada masyarakat desa taeng. (Hasil wawancara peneliti dengan bapak Muh. Kasim tanggal 30 Mei 2022).

Berdasarkan hasil wawancara informan 1 dan 2 menjelaskan bagaimana penyaluran komunikasi yang pemerintah desa lakukan, dengan cara menampilkan informasi berupa kegiatan-kegiatan yang

berkaitan langsung dengan desa taeng, pada laman website desa agar dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Berikut tabel tampilan berupa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Tabel 4.2 Berita lokal pada tampilan website desa taeng

No. S	Tanggal Artikel	Judul Artikel	Penulis
1. e d	26 November 2020	Sampah Menumpuk di Taeng, Kadis Lingkungan Hidup Imbau Warga Jaga Kebersihan	Akhmad
2. a n	26 November 2020	Semprot Cairan Disinfektan di Sejumlah Perumahan di Gowa. Tulisan ini sudah terbit di: Tribun Timur	Akhmad
3. g k	23 November 2020	Kades Taeng Bagikan Warganya Masker dan Handsanitizer	Akhmad

Sedangkan dari informan 3 dan informan 4 yang diwawancara oleh peneliti:

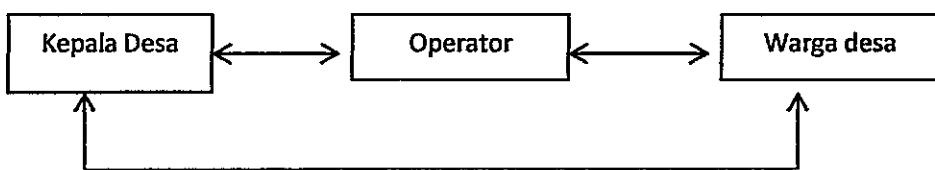
“ Iya, saya tahu kalau desa taeng punya website dan juga saya pernah membuka website tersebut untuk sekedar mengecek isinya saja. Saat saya membuka website muncul beberapa tampilan menu dan berita-berita lokal yang ada didesa taeng” (hasil wawancara peneliti dengan ibu Aliyah tanggal 25 Mei 2022).

“Kalau soal website desa taeng, saya tidak tau dan belum pernah mendapatkan informasi mengenai hal tersebut” (Hasil wawancara peneliti dengan bapak Ilham tanggal 30 Mei 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa transmisi/penyaluran komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa masih kurang efektif, hal ini dapat dilihat dari perbedaan hasil wawancara antara informan 3 dengan informan 4 (masyarakat),

sehingga masih ada masyarakat yang tidak tahu cara menggunakan website desa taeng.

Untuk penyaluran komunikasi dapat dilihat pada gambar sistem operasional alur komunikasi, dimana (Kepala Desa), menyalurkan informasi (operator website) kemudian informasi tersebut di salurkan kepada (Warga desa) untuk mendapatkan respon dari pihak-pihak terkait.



Gambar 4.4 Alur Sistem operasional komunikasi

2) Kejelasan

Kejelasan informasi merupakan hal yang penting karena dengan adanya kejelasan komunikasi diharapkan tidak terjadi perbedaan persepsi antara pembuat kebijakan, pelaksana dan masyarakat. Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala desa dan Operator Website/sekertaris desa :

“ Pada tampilan website desa masyarakat dapat melihat beberapa bagian-bagian layanan sesuai kebutuhan salah satunya itu mengenai profil desa, data desa, layanan mandiri dan masih banyak lagi yang bisa diakses oleh masyarakat sehingga mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan”. (Hasil Wawancara peneliti dengan bapak H.Nurdin yasin tanggal 30 Mei 2022).

“ Untuk saat ini mengenai pelayanan persuratan pada layanan mandiri itu masih pada tahap pengoptimalan dikarenakan data masyarakat yang cukup banyak sehingga memerlukan waktu untuk mengolahnya yang semoga tahun ini sudah bisa

dimaksimalkan. (wawancara peneliti dengan bapak Muh.Kasim tanggal 30 Mei 2022)

Sedangkan wawancara peneliti dengan Masyarakat :

“ Saya belum pernah mencoba layanan mandiri yang ada di website tetapi jika mengenai data data desa saya sudah melihat pada website desa taeng,itu dapat membantu masyarakat yang membutuhkan data desa tanpa harus ke kantor desa lagi” (wawancara peneliti dengan ibu Aliyah tanggal 25 Mei 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa kejelasan dalam pelayanan masih belum efektif karena masih ada layanan yang belum maksimal untuk digunakan oleh masyarakat. hal ini dapat terlihat dari pernyataan operator/sekertaris desa.

3). Konsistensi

Indikator selanjutnya dalam komunikasi yaitu konsistensi. Konsistensi diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target kelompok dan pihak-pihak yang berkepentingan. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas, jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Berikut wawancara yang dilakukan peneliti dengan Operator wensite/ sekertaris desa :

“Pembaruan data- data pada tampilan website desa itu kalau disetiap tahunnya itu belum optimal karena saya cukup kewalahan yah sehingga saya membutuhkan bantuan staff yang mahir dalam mengoperasikan website agar bisa berjalan dengan maksimal, dan untuk staff itu sendiri masih butuh pelatihan lebih lanjut lagi.” (wawancara dengan Bapak H. Nurdin Yasin tanggal 30 Mei 2022).

Berdasarkan wawancara dengan informan maka disimpulkan bahwa dalam pembaruan data pada website tidak konsisten, sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan konsistensinya tidak efektif.

b. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam implementasi sistem informasi publik berbasis website di desa taeng terdapat 2 karakteristik utama yaitu: SOP (standar operasional prosedur), Fragmentasi :

1. SOP

SOP (*standard operational procedure*) prosedur-prosedur dasar kerja adalah salah satu struktur dasar dari suatu organisasi. Dengan menggunakan SOP para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia , selain itu SOP juga menyeragami tindakan-tindakan dari pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas yang pada gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan-peraturan. Berikut wawancara peneliti dengan Kepala Desa:

“ Di Zaman ini kemajuan teknologi sangat cepat sehingga banyak masyarakat yang menginginkan informasi publik yang mudah diakses maka dari itu desa taeng membuat website berdasarkan perdoman dari bupati Gowa dengan peraturan bupati Gowa no.21 tahun 2018 tentang pengelolaan pelayanan informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah, dalam peraturan tersebut terdapat syarat-syarat untuk menerapkan sistem informasi website di desa ini”(wawancara peneliti dengan H. Nurdin Yasin tanggal 30 Mei 2022).

Berdasarkan Hasil wawancara dengan peneliti dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem informasi website ini didasari dengan adanya

peraturan langsung dari bupati gowa, sehingga aturan dari kabupaten di terapkan langsung oleh pemerintah desa taeng.

2. Fragmentasi

Fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab pada beberapa organisasi. Fragmentasi menjadi faktor yang penting dalam keberhasilan implementasi dikarenakan semakin tersebar tanggung jawab pada banyak organisasi maka semakin memerlukan koordinasi yang lebih intensif, apabila tidak maka akan dengan mudah terjadi kesalahpahaman yang akan menghambat keberhasilan suatu implementasi. Sebaliknya jika tanggung jawab dipegang oleh satu organisasi saja maka akan dapat dengan mudah mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa :

“Penggunaan website untuk informasi publik untuk zaman sekarang ini sangat diperlukan karna lebih memudahkan dan membantu staff dalam melaksanakan tugasnya dan saya selaku kepala desa yang bertanggung jawab penuh dalam implementasinya dan yang membantu saya agar terlaksana dengan baik ada pak sekdes, yang bertanggung jawab dalam melaksanakan dan melaporkan hasil. Sehingga implementasinya berjalan dengan baik.” (Hasil wawancara peneliti dengan H.Nurdin Yasin tanggal 30 mei 2022).

Berikut hasil wawancara peneliti dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi dijalankan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sehingga dalam fragmentasi dalam implementasi sistem informasi berbasis website didesa taeng ini dapat dikatakan bahwa sudah terlaksana.

c. Sumber Daya

Sumber daya dipilih sebagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan karena implementasi kebijakan memerlukan dukungan sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana untuk melaksanakan implementasi kebijakan sistem informasi publik berbasis website di desa taeng, dikarenakan masyarakat juga membutuhkan informasi yang mudah diakses, maka dibuatlah sistem informasi publik berbasis website didesa taeng agar mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi dan staff juga mendapatkan keuntungan dalam mempermudah tugas untuk menyebarkan informasi kemasyarakatan. Adapun beberapa data informasi yang dicantumkan diwebsite pada tahun 2019 sebagai berikut.

Data Profil Desa Taeng Pada Website Tahun 2019

Tabel 4.3 Data Wilayah Administratif

Dusun	Jenis kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Taeng	2.467	2.487	4.954
Gantarang	2.041	2.142	4.183
JUMLAH	4.508	4.629	9.137

Tabel 4.4 Data Pendidikan

No	Uraian	Jumlah		Prosentasi (%)
		L	P	
1	Belum Sekolah	710	721	15,66
2	Tidak/belum tamat SD	901	853	19,20
3	Tamat SD	789	744	16,78
4	Tamat SLTP	764	811	17,24

5	Tamat SLTA	815	880	18,55
6	Sarjana Muda (D3)	251	315	6,19
7	Sarjana (S1)	234	256	5,36
8	Pasca Sarjana (S2)	37	52	0,98
9	Pasca (S3) dll	3	1	0,04
Jumlah		4.504	4.633	100

Tabel 4.5 Data Pekerjaan

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH			(%)
		L	P	JUMLAH	
1	Petani	45	0	45	0,49
2	Pelajar/Mahasiswa	1.689	1.736	3.425	37,48
3	Pegawai Swasta	398	127	525	5,75
4	Pedagang	170	302	472	5,17
5	Pegawai Negeri Sipil	189	55	244	2,67
6	TNI/Polri	134	1	135	1,48
7	Buruh Swasta	880	69	949	10,39
8	Pengrajin	3	5	8	0,09
9	Penjahit	6	9	15	0,16
10	Tukang Kayu	47	0	47	0,51
11	Dokter	0	2	2	0,02
12	Sopir / Pengemudi	45	0	45	0,49
13	Pengusaha	19	8	27	0,30
14	Pegawai BUMN	22	9	31	0,34
15	Mengurus Rumah Tangga	0	926	926	10,13
16	Belum / Tidak Bekerja	861	1.380	2.241	24,53
JUMLAH		4.508	4.629	9.137	100

Tabel 4.6 Data Agama

No	AGAMA	J U M L A H			PERSENTASE (%)
		L	P	Jml	
1	Islam	4.150	4.191	8.424	92,20
2	Kristen Katolik	5	8	13	0,14
3	Kristen Protestan	36	49	85	0,93
4	Budha	2	2	4	0,04
5	Hindu	4	5	9	0,10
6	Atheis	0	0	0	0,00
	JUMLAH	4.197	4.255	9.137	100

Tabel 4.8 Data berdasarkan kelompok umur

NO	KELOMPOK USIA	L	P	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1	0 - 5 tahun	391	438	829	9,07
2	6 - 9 tahun	488	514	1.002	10,97
3	10 - 15 tahun	563	539	1.102	12,06
4	16 - 19 tahun	442	415	857	9,38
5	20 - 24 tahun	357	362	719	7,87
6	25 - 29 tahun	256	267	523	5,72
7	30 - 34 tahun	158	185	343	3,75
8	35 - 39 tahun	425	454	879	9,62
9	40 - 44 tahun	548	587	1.135	12,42
10	45 - 49 tahun	360	368	728	7,97
11	50 - 54 tahun	144	156	300	3,28
12	55 - 59 tahun	110	128	238	2,60
13	60 - 64 tahun	144	156	300	3,28
14	> 65	86	96	182	1,99
	JUMLAH	4.197	4.255	9.137	100

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sangat di perlukan guna melakukan implementasi sistem informasi publik berbasis website di desa taeng. Berikut

wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Muh Kasim selaku sekertaris dan juga operator website :

“Pengoperasian website desa dikelola langsung oleh sekertaris desa, sekertaris desa yang bertanggung jawab dalam mengoperasikan website, dalam mengoperasikan website pengelolah dituntut untuk mengikuti pelatihan khusus agar dalam mengoperasikannya tidak terdapat kendala”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia sangat berpengaruh dalam pengimplementasian sistem informasi berbasis website didesa taeng ini dikelola langsung oleh sekertaris desa yang sudah mendapatkan pelatihan khusus.

2. Sarana Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan faktor yang penting dalam implementasi kebijakan. Dengan peralatan yang memadai maka akan mempermudah dan memotivasi para pelaksana sehingga suatu kebijakan dapat berjalan dengan efektif. Peralatan yang tersedia untuk menunjang implementasi Sistem Informasi Publik berbasis website di Desa Taeng. Berikut yang diungkapkan dalam pernyataan dibawah ini :

“ Penerapan sistem informasi berbasis website pada tahun 2019 yang tentunya masih dalam keterbatasan baik dari segi prasarana maupun sistemnya, tahun 2019 kami sudah membenahi sedikit demi sedikit terkait dengan data center yang berfungsi menyimpan server-server walau belum memenuhi standar dan perangkat-perangkat elektronik kami sudah memiliki seperangkat komputer, laptop, printer, LCD dan juga jaringan internet yang mendukung. (Hasil Wawancara peneliti dengan Muh.Kasim tanggal 30 Mei 2022).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasana untuk implementasi sistem informasi publik berbasis website belum maksimal akan tetapi walau belum maksimal

implementasi sistem informasi website ini diusahakan berjalan dengan baik.

d. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi suatu program. Apabila pelaksana setuju dengan isi dan maksud kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati. Dari penelitian yang telah dilakukan, terlihat disposisi atau sikap dari pelaksana sistem informasi publik berbasis website . Berikut hasil Wawancara peneliti:

“ Sikap Kepala desa sangat mendukung implementasi sistem informasi publik berbasis website, dengan menyiapkan prasarana yaitu komputer, internet, dan kepala desa juga akan menambahkan staff yang bertanggung jawab terhadap operator website, dan setiap staff menerima SK atau surat tugas dari kepala desa. (hasil wawancara peneliti dengan Muh.kasim tanggal 30 Mei 2022)

Berikut kesimpulan hasil wawancara peneliti dengan informan dapat disimpulkan bahwa kepala desa sangat mendukung implementasi sistem informasi publik berbasis website.

Data Informasi Kegiatan Kepala Desa Taeng Tahun 2019-2020

No.	Informasi Kegiatan	Tahun	
		2019	2020
1.	Penyelenggaraan pemerintah desa :		
	Penetapan peraturan desa	1	2
	Pembinaan masalah pertanahan	0	0
	Pembinaan ketentraman dan ketertiban	0	1

	Perlindungan masyarakat	1	1
	Administrasi kependudukan	7	7
	Penataan dan pengelolaan wilayah	0	0
2.	Pembangunan :		
	Pembangunan sarana prasarana perdesaan	3	5
	Pembangunan bidang pendidikan	2	3
	Pembangunan kesehatan	2	2
3.	Pembinaan kemasyarakatan :		
	Pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat	1	1
	Partisipasi masyarakat	3	3
	Sosial budaya masyarakat	0	1
	Keagamaan	1	1
	Ketenaga kerjaan	1	2
4.	Pemberdayaan masyarakat :		
	Bidang Budaya	0	1
	Bidang Ekonomi	0	1
	Bidang Politik	1	3
	Pemberdayaan keluarga	2	3
	Pemuda, olahraga, dan karang taruna	2	2

Sumber: Website Kantor Desa Taeng Tahun 2019-2020

Dari data informasi kegiatan kepala desa tahun 2019-2020 yang terdiri dari 4 bagian kegiatan yaitu penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintah desa ada peningkatan di bidang penetapan peraturan desa dan administrasi kependudukan., pembangunan ada peningkatan di bidang sarana dan prasarana serta bidang pendidikan. Pembinaan kemasyarakatan, normal tidak terjadi peningkatan maupun penurunan. Pemberdayaan masyarakat , ada peningkatan pada setiap poin kecuali pada bidang pemuda, olahraga dan karang taruna yang tetap sama atau tidak terjadi peningkatan maupun penurunan. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari data informasi kegiatan kepala desa tahun 2019-2020 ada peningkatan namun belum begitu pesat dan bersifat menyeluruh.

2. Faktor pendukung dan Faktor penghambat implementasi sistem informasi publik berbasis website di desa taeng

a. Faktor pendukung implementasi sistem informasi publik berbasis website di desa taeng

Sistem informasi publik berbasis website di desa taeng memiliki faktor yang menjadi pendukung didalam program ini, salah satunya dukungan masyarakat yang juga merupakan bahan pertimbangan. Masyarakat berharap agar pemerintah desa lebih memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi dan juga pelayanan yang diperlukan. Dukungan dari warga untuk cepat mengoptimalkan program ini, seperti yang disampaikan berikut ini:

“Memudahkan mendapat informasi dan juga pelayanan sangat membantu masyarakat, zaman sekarang hampir semua orang mempunyai android baik dari khalangan orang tua maupun anak-anak. Dengan adanya penerapan sistem informasi berbasis website ini dapat mempercepat mendapatkan informasi mengenai desa dan juga memudahkan mendapatkan pelayanan sehingga saya selaku masyarakat sangat mendukung adanya sistem informasi website ini.” (Hasil wawancara dengan ibu aliah tanggal 25 Mei 2022)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti maka di simpulkan bahwa dengan dioptimalkan sistem informasi berbasis website ini dapat menguntungkan kedua belah pihak yakni masyarakat dan juga pemerintah desa yang sama-sama dipermudah dalam hal pelayanan maupun keterbukaan informasi.

b. Faktor penghambat implementasi sistem informasi publik berbasis website di desa taeng

Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena fasilitas ini merupakan 50% menjadi kunci keberhasilan konsep program ini. ketersediaan sarana dan prasarana guna menunjang sistem informasi publik berbasis website tidaklah gampang, karena membutuhkan anggaran, data data masyarakat yang cukup banyak demi mewujudkan program ini. Seperti yang disampaikan sekertaris desa dan juga selaku operator website :

“Faktor penghambat implementasi sistem informasi publik salah satunya kurangnya SDM dalam mengoperasikan website sehingga akan berpengaruh pada berjalannya sistem informasi berbasis website desa in”.(hasil wawancara peneliti dengan bapak Muh. kasim tanggal 30 Mei 2022).

Berdasarkan Hasil wawancara peneliti maka ditarik kesimpulan bahwa hambatan yang ada dalam pengimplementasian sistem informasi berbasis website ini kurangnya SDM dalam pengoperasian websit sehingga pelayanan berbasis website belum di optimalkan.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Implementasi Sistem informasi Publik Berbasis Website di Desa Taeng

Perkembangan teknologi semakin cepat karena itu mengakibatkan banyaknya masalah yang terjadi di masyarakat. Masyarakat yang inginkan ketersediaan sumber informasi yang cepat dan transparan beserta pelayanan publik yang harus baik maka dari itu terjadinya pengembangan organisasi di pemerintah sehingga pemerintah desa taeng membuat suatu kebijakan yaitu Implmentasi Sistem Informasi Publik Berbasis Website yang dimana sistem informasi ini sangat berperan penting untuk dapat membantu menyelesaikan suatu masalah yang ada di masyarakat maupun di pemerintah desa, pada UU Desa No

32/2004 tentang Pemerintah Daerah dan PP No 72/2005 tentang Desa tidak diatur secara khusus, mengenai sistem informasi seperti SID. Maka dari itu 4 indikator dapat membantu Implementasi Sistem informasi Publik Berbasis Website di Desa Taeng menurut Edward, (1980) yaitu Komunikasi, Struktur Birokrasi,Sumber Daya, dan Disposisi.

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor yang sangat penting guna menunjang keberhasilan implementasi suatu program, karena dengan adanya komunikasi maka para pelaksana kebijakan dapat mengetahui dan memahami apa tujuan kebijakan, arah kebijakan, kelompok sasaran suatu kebijakan serta juga dapat memahami apa yang harus dilakukan selaku pelaksana kebijakan. Dalam hal implementasi Sistem Informasi publik Berbasis Website telah melakukan berbagai upaya komunikasi kepada para para pelaksana kebijakan diperkuat dengan penelitian Effendy, dalam Dowongi et al., (2014) komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu, mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik secara lisan (langsung) ataupun tidak langsung melalui media.

1) Transmisi/Penyaluran komunikasi

Dimensi transmisi memerlukan kebijakan publik agar disampaikan tidak hanya disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap

kebijakan tersebut oleh karena itu, dimensi komunikasi mencangkup transformasi kebijakan, kejelasan, dan konsistensi.

Sesuai hasil wawancara dan observasi, penyaluran komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa masih kurang efektif dalam menyapaikan informasi melalui laman website dimana masih ada masyarakat yang belum mengetahui cara mengakses dan menggunakan website desa.

Transmisi merupakan penyaluran atau penyampaian informasi yang dilakukan oleh implementor diperkuat dengan penelitian (Mursalim, 2017) Walikota Bandung menugaskan seluruh komponen SKPD atau Dinas-dinas harus menjalankan Smart City dan mensosialisasikan mengenai program Smart City kepada daerah nya masing-masing yang terdapat di Kota Bandung agar sosialisasi atau penyuluhan mengenai Smart City lebih merata kepada seluruh kalangan masyarakat.

2) Kejelasan

Kejelasan merupakan indikator kedua dari komunikasi. Jika kebijakan yang diimplementasikan sesuai yang diinginkan maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal.

Sesuai hasil wawancara dan obeservasi, kejelasan dalam pengimplementasian sistem informasi publik berbasis website masih kurang jelas karena masih ada beberapa layanan yang belum maksimal untuk diakses oleh masyarakat.

Kejelasan merupakan bagaimana komunikator untuk menyampaikan pesannya secara jelas sehingga tercapailah tujuan komunikasi dengan sampainya pesan kepada komunikan diperkuat dengan penelitian (Ratri, 2014) Ketidakjelasan informasi akan menghambat implementasi kebijakan. Sampai saat ini proses penyampaian informasi sudah cukup jelas kepada para pelaksana kebijakan namun belum sampai pada masyarakat sebab hanya beberapa saja yang mengetahui esensi dari KLA bahkan sebagian besar tidak mengetahui tentang adanya kebijakan Kota Layak Anak. Menurut penuturan Ratih selaku warga Kota Probolinggo, selama ini belum ada sosialisasi khusus untuk Kota Layak Anak pada masyarakat. Demikian pula yang dinyatakan Sukardimoto, sosialisasi kepada masyarakat belum dilaksanakan secara massif. Sosialisasi baru dilakukan di sekolah-sekolah, kepada LSM atau Ormas pun belum sepenuhnya dilaksanakan.

3) Konsistensi

Konsistensi merupakan faktor ketiga yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi jika perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. Di sisi lain, perintah-perintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang lebih luas untuk menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan. Bila hal ini terjadi, maka akan berakibat pada ketidakefektifan implementasi kebijakan karena tindakan yang sangat longgar. besar kemungkinan tidak dapat digunakan untuk melaksanakan tujuan-tujuan kebijakan.

Adapun hasil wawancara dan observasi, dalam pengupdatean data pada laman website desa masih belum konsisten sehingga dapat dikatakan bahwa penerapannya masih belum efektif.

Konsistensi juga merupakan perintah yang diberikan dalam pelaksanaan sebuah komunikasi untuk konsisten dan jelas agar ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan diperkuat dengan penelitian Ratri, (2014) kekonsistenan sebuah perintah juga diperlukan agar proses implementasi kebijakan menjadi lebih cepat dan efektif sehingga perintah-perintah yang diberikan haruslah konsisten dan jelas. Ketidakkonsistenan perintah akan mendorong pelaksana kebijakan mengambil tindakan yang sangat longgar dalam mengimplementasikan kebijakan. Dinas-dinas pelaksana teknis

menyatakan bahwa sampai saat ini perintah yang diberikan oleh atasan kepada bawahan sudah konsisten.

b. Struktur Birokrasi

Menurut Edward III, terdapat dua karakteristik utama dari Struktur birokrasi, yakni SOP dan fragmentasi. Karakteristik utama dari birokrasi SOP berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan di luar unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi organisasi birokrasi-birokrasi pemerintah.

1) *Standart operational Procedure (SOP)*

Standart Operational Procedure (SOP) menjadi faktor yang penting dalam menunjang keberhasilan implementasi dikarenakan dengan adanya SOP maka kebijakan dapat dilaksanakan dengan jelas dan seragam karena sudah terdapat prosedur yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, SOP penerapan sistem informasi publik berbasis website di dasari dengan peraturan bupati gowa yang sudah ada pada tahun 2018 tentang Pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi pemerintah daerah, Bab 1 pasal 1 ayat 19 Sistem Informasi Publik yang selanjutnya disingkat SIP

merupakan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan pasal 13, ayat (1), huruf b, undang-undang keterbukaan informasi publik sehingga dapat dikatakan bahwa SOP sudah efektif dalam implementasi sistem informasi publik berbasis website didesa taeng.

SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan di perkuat dengan penelitian Anta Kusuma & Simanungkalit, (2022) SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor.

2) Fragmentasi

Fragmentasi merupakan pembagian tanggungjawab sebuah bidang kebijakan diantara unit-unit organisasi. Konsekuensi paling buruk dari fragmentasi birokrasi adalah usaha untuk menghambat koordinasi para birokrat karena alasan-alasan prioritas dari badan-badan yang berbeda mendorong birokrat untuk menghindari koordinasi dengan badan-badan lain. Padahal penyebaran wewenang dan sumber-sumber untuk melaksanakan kebijakan yang kompleks membutuhkan koordinasi. Fragmentasi menyebabkan pandangan-pandangan yang sempit dari

banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan dua konsekuensi pokok yang merugikan bagi implementasi kebijakan.

Dalam wawancara dan obsevasi, Struktur birokrasi dalam fragmentasi berjalan sesuai dengan penyebaran tanggung jawab masing-masing pelaksana sehingga penerapannya sudah sesuai.

Fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab pada beberapa organisasi. Diperkuat dengan F, (2022) Fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab agar tetap bersaing secara sehat, aparatur SAMSAT Wilayah Kota Makassar berpegang pada tindakan SAMSAT Wilayah Kota Makassar, yaitu mewujudkan pegawai Samsat Wilayah Kota Makassar yang profesional dan fasilitatif serta meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat dan meningkatkan suasana menjadi Kantor yang bertarif (transparan, akuntabel, responsif, independent dan fairnes), hukum dalam pelayanan.

3. Sumber Daya

Implementasi sistem informasi public berbasis website diperlukan adanya sumber daya yang baik. Faktor ini sangat menentukan untuk mendukungnya keberhasilan kebijakan. Menurut Edward III (1980:53), sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Sumber daya utama dalam kebijakan adalah aparatur/pegawai atau sumber daya manusia. Dengan adanya sumber daya manusia yang memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya merupakan penyebab tidak terlaksana dengan baik implementasi kebijakan. Fasilitas fisik juga

merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

1) Sumber Daya Manusia

Dalam hal ini yang dimaksud dengan sumber daya manusia adalah adanya staff yang bertugas dan bertanggung jawab untuk pelaksanaan suatu program. Dalam pelaksanaan pelayanan melalui website ini yang bertugas adalah sekertaris desa dikarenakan belum ada staff khusus yang disediakan, Kepala Desa merupakan penanggung jawab seluruh kegiatan yang ada di Desa Taeng, sedangkan operator merupakan staff yang bertugas untuk melayani masyarakat yang melakukan pengurusan melalui website desa.

Sesuai hasil wawancara dan observasi, dalam sumber daya manusia yang mengoperasikan website desa adalah sekertaris desa yang dimana telah mengikuti pelatihan secara khusus mengenai penggunaan website.

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan diperkuat dengan penelitian Hal ini sesuai dengan kriteria sumber daya manusia pada teori Edward III dalam Yuanita et al., (2022) yang mengatakan bahwa walau isi kebijakan sudah di komunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi

apabila implementor kekurangan sumber daya manusia untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan dengan efektif.

2) Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana dalam sumber daya adalah semua sarana dan prasarana yang tersedia demi terselenggaranya pelaksanaan suatu kebijakan dan dipergunakan untuk mendukung secara langsung dan terkait dengan tugas-tugas yang ditetapkan.

Berdasarkan wawancara dan observasi Pemerintah desa dalam menyiapkan sarana prasarana sudah tergolong memadai meskipun belum maksimal tetapi masih diusahakan agar tetap berjalan dengan baik.

Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Diperkuat dengan penelitian Ratri, (2014) Sumber daya fasilitas atau sarana dan pra-sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan bisa berupa gedung, tanah, alat dan sarana yang semuanya berfungsi untuk memudahkan dalam pemberian pelayanan dalam implementasi kebijakan.

d. Disposisi/ Sikap

Keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan (implementors) mengetahui apa yang harus

dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan yang memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan. Disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, hal ini berarti adanya dukungan yang kemungkinan besar mereka akan melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diingini oleh pembuat kebijakan. Demikian pula sebaliknya, apabila tingkah laku-tingkah laku atau perspektifperspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit.

Berdasarkan wawancara dan observasi bahwa kepala desa sangat mendukung implementasi sistem informasi publik berbasis website, dengan disediakannya prasarana dan juga akan ditambahkan staff sebagai operator website setiap staff yang bertugas dikantor desa taeng akan diberikan surat tugas atau SK. Di perkuat dengan penelitian Dowongi et al., (2014) Disposisi merupakan watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Disposisi itu seperti komitmen, kejuran, dan sifat demokratik. Jika pelaksana kebijakan memiliki karakteristik atau watak yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan yang baik dengan sasaran dan keinginan pembuat kebijakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa disposisi yaitu karakteristik yang menempel kepada implementor,

(pegawai/petugas) seperti: komitmen dalam memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya, kejujuran, semangat pengabdian.

2. Faktor pendukung dan penghambat implementasi system informasi public berbasis website

a) Factor pendukung implementasi system informasi public berbasis website di desa taeng

Factor pendukung implementasi system informasi public berbasis website salah satunya adalah aturan pada UU Desa No 32/2004 tentang Pemerintah Daerah dan PP No 72/2005 tentang Desa tidak diatur secara khusus, mengenai sistem informasi seperti SID. Undang-Undang Desa sejatinya adalah kebijakan pemerintah yang patut untuk diapresiasi karena dikeluarkannya UU ini adalah sebagai bentuk nyata kepedulian pemerintah untuk membangun desa. Peraturan bupati Gowa No. 21 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi pemerintah daerah. Selanjutnya sarana dan prasarana cukup mendukung untuk mengimplementasikan system informasi berbasis website ini di desa taeng. Dan juga tentunya dukungan dari masyarakat.

b. Factor penghambat system informasi public berbasis website di desa taeng

Pemerintah desa dalam menyiapkan infrastruktur sudah tergolong memadai. Sedangkan dari Faktor penghambatnya dari SDM masih memerlukan satu staff yang bisa membantu mengoperasikan website karena kekurangan staff ini juga mempengaruhi keberhasilan dari konsistensi dan juga menghambat berjalannya pelayanan serta penyebaran

infoermasi. Diperkuat dengan penelitian Setyawan & Srihardjono, (2016) Faktor penghambat implementasi Program Dana Desa di Desa Landungsari sesuai dengan Undang- Undang Desa adalah kendala yang muncul di lingkungan pemerintahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan peneliti dengan judul Implementasi Sistem Informasi Publik Berbasis Website di Desa Taeng, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi sistem informasi publik berbasis website didesa taeng ditinjau dari unsur : komunikasi, struktur birokrasi, sumber daya dan disposisi yang meliputi :
 - a. Komunikasi dalam implementasi sistem informasi publik berbasis website di desa taeng sudah berjalan meskipun masih perlu ditingkatkan dari transmisi; penyaluran komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa masih kurang efektif, kejelasan; masih kurang karena masih ada beberapa layanan yang belum maksimal untuk diakses oleh masyarakat, Konsistensi; masih belum efektif dalam pembaruan data pada laman website.
 - b. Struktur Birokrasi dalam implementasi sistem informasi publik berbasis website didesa taeng berdasarkan, SOP; peraturan bupati gowa yang sudah ada pada tahun 2018 tentang Pedoman pengelolaam pelayanan informasi dan dokumentasi pemerintah daerah, Fragmentasi; sudah berjalan sesuai dengan penyebaran tanggung jawabnya masing-masing.
 - c. Sumberdaya implementasi sistem informasi publik didesa taeng terdiri dari SDM; dioperasikan oleh sekertaris desa yang sudah mendapatkan pelatihan

khusus terkait pengopersian website, Sarana dan prasarana; sudah memadai baik dari segi sarana ataupun prasarana yang digunakan.

d. Disposisi terhadap implementasi sistem informasi publik berbasis website di desa taeng sudah efektif karena kepala desa sangat mendukung adanya website ini.

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi sistem informasi publik yaitu:

a. Faktor pendukung implementasi sistem informasi publik berbasis website didesa taeng terdiri dari: SOP; peraturan bupati gowa yang sudah ada pada tahun 2018 tentang Pedoman pengelolaam pelayanan informasi dan dokumentasi pemerintah daerah, Fragmentasi; sudah berjalan sesuai dengan penyebaran tanggung jawabnya masing-masing. Sarana dan prasarana; sudah tergolong memadai meskipun belum maksimal tetapi sudah berjalan dengan baik.

b. Faktor penghambat implementasi sistem informasi publik berbasis website didesa taeng terdiri dari: transmisi; penyaluran komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa masih kurang efektif, kejelasan; masih kurang karena masih ada beberapa layanan yang belum maksimal untuk diakses oleh masyarakat, Konsistensi; masih belum efektif dalam pembaruan data pada laman website. Dan SDM; masih membutuhkan staff dalam membantu mengoperasikan website agar dapat berjalan dengan optimal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka penulis memberikan saran atau masukan yaitu:

1. Pemerintah Desa Taeng sebaiknya memperbarui data-data pada tampilan website desa taeng, agar masyarakat dapat mendapatkan informasi terupdate dari desa.
2. Pemerintah Desa Taeng sebaiknya memperbanyak Sosialisasi kepada masyarakat mengenai penggunaan pelayanan publik berbasis website agar masyarakat dapat mendapatkan manfaat yang lebih baik dan sosialisasi perlu lebih di maksimalkan terhadap masyarakat dengan melakukan berbagai inovasi seperti pengaktifan akun sosial media untuk tersebarnya informasi dan mengadakan pelatihan khusus untuk penggunaan sistem informasi publik berbasis website desa taeng.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Agranoff, R., & McGuire, M. (2003). *Collaborative Public Management*.
- Agus Mulyanto. (2009). *Konsep dan Aplikasi Sistem Informasi*. pustaka pelajar.
- Anderson, J. E. (1978). *Public Policy making* (R. and Winston (ed.)).
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. CV. Setia Bandung.
- de Leon, P. dan L. (2002). What Ever Happened to Policy Implementation? An Alternative Approach". In *Journal of Public Administration Research And Theory*.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy* (C. Q. Press (ed.)).
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World* (New Jersey). Princeton University Press.
- Hufsen, J. A. M., & Ringeling, A. (1990). *Beleidsnetwerken Overheids, Semi Overheids , en particuliere organisaties in wisselwerking*. The Hague: Vague.
- Hull, C. J., & With Benny Hjern. (1987). *Helping Small Firm Grow : An Implementation Perspective*.
- Husein, F. (2014). *Sistem Informasi Akuntansi*.
- Hutahaean, J. (2014). *Konsep Sistem Informasi* (1st ed.). Deepblish Publisher.
- Jogiyanto. (2009). *Teknologi Sistem Informasi* (edisi 3). Andi Offset.
- Koppenjam, E.-H. and, Klijn, Walter, & Kickert. (1997). *Managing Complex Network: Network Management and the Public Sector* (Joop (eds)).
- Laurence J. Jr, O. (n.d.). *Implementting Public Program* (in J. L. Perry (ed.); 2nd edn). Handbook of Publk Administration.
- Lipsky, M. (1980). *Street-Level Bureaucracy: The Dilemmas of the Individual in Public Services*.
- Maynard-Moody, S., & Musheno, M. (2003). *Cops, Teachers, Counselors: Narratives of Street-Level Judgment* (Ann Arbor).

- Mayntz, R., & Scharp, and F. W. (1995). *Der Ansatz des akteurzentrierten Institutionalismus* (and F. W. in Renate Mayntz (ed.); Scharpf (e). Frankfurt a.M: Campus Verlag.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, A. (1983). *Implementation and Public Policy*.
- O, D., Porter, B. and, & Hjer. (1981). Implementation Structures. In *A New Unit of Administrative Analysis*. Organization Studies.
- O'Brien, J. A. (2006). *Pengantar Sistem Informasi Akuntansi Perspektif Bisnis Dan Manajerial*. Selemba Empat.
- Rittel, H. W. ., & Webber, and M. (1973). *Dilemmas in A General Theory of Planning*. Policy Sciences.
- Suparno. (2017). *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek*. dwiputra pustaka jaya.
- Torenvlied, R. (n.d.). *Political Control of Implementation Agencies, Effects of Political Consensus on Agency Compliance*. Rationality and Society.
- Vinzant, J. ., & Crothers, L. (1998). *Street-Level Leadership: Discretion and Legitimacy in Front-Line Public Service*.
- Widodo, J. (2021). *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Media Nusa Creative.
- Winter, S. C. (2004). *Handbook of Public Administration* (Edited by). SAGE Publications.
- Sumber Jurnal :**
- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana HAEDAR AKIB Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Negeri Makassar ABSTR. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 1–11. https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:T6sBEYjBjTcJ:scholar.google.com/+Implementasi+kebijakan:+Apa,+mengapa+dan+bagaimana.+Jurnal+Ilmiah+Ilmu+Administrasi+Publik.&hl=en&as_sdt=0,5
- Anggraeni, & Irviani. (2019). Aplikasi Persediaan Barang Menggunakan Metode Distribution Requirements Planning pada PD. Bintang Baru Palembang. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9).

- Anta Kusuma, I. G. K. C. B., & Simanungkalit, Y. T. S. (2022). Implementasi Inisiatif Pajak Menurut Model G Edward III. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 236–248. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1523>
- Dowongi, A., Lengkong, F. D., & Kiyai, B. (2014). *Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kantor Camat Jailolo Kabupaten Halmahera Barat*. 59.
- F, D. U. (2022). *Implementasi Pealayanan Publik Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Drive THRU di Kota Makassar*. 8.5.2017, 2003–2005.
- Kaka, J. B. I. (2021). *Stategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Melalui Sistem Informasi Desa Di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, DIY*. 1–39.
- Krisnayani, P., Resika Arthana, K., & Mahendra Darmawangsa, G. (2016). Analisa Usability Testing Pada website Menggunakan Metode Heuristic Evaluation. *Kumpulan Artikel Mahasiswa Pendidikan Teknik Informatika (KARMAPATI)*, 5(1), 98.
- Mursalim, S. W. (2017). Implementasi Kebijakan Smart City Di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 14(1), 126–138. <https://doi.org/10.31113/jia.v14i1.1>
- MZ, Y. (2016). Evaluasi Penggunaan Website Universitas Janabadra Dengan Menggunakan Metode Usability Testing. *Informasi Interaktif*, 1(1), 34–43. <https://www.e-journal.janabadra.ac.id/index.php/informasiinteraktif/article/viewFile/345/253> <http://www.c-journal.janabadra.ac.id/index.php/informasiinteraktif/article/view/345>
- Parawangi, A. (2011). *Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah Di Kabupaten Bone*.
- Puji Astuti, N., & Dharmadiaksa, I. (2014). Pengaruh Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Pemanfaatan dan Kesesuaian Tugas dengan Teknologi Informasi pada Kinerja Karyawan. *E-Jurnal Akuntansi*, 9(2), 373–384.
- Rachman, T. (2018). Implementasi Program Keluarga Harapan Sektor Pendidikan di Kelurahan Molas Kecamatan Bunaken Kota Manado. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 10–27.

- Rahayu, S. K., & Anggadini, S. D. (2014). Analisis Budaya Organisasi Pada Pengembangan Sistem Informasi di unikom. *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 12(2), 203–210. <https://doi.org/10.34010/miu.v12i2.27>
- Rahmawati, N. A., & Bachtiar, A. C. (2018). Analisis dan perancangan sistem informasi perpustakaan sekolah berdasarkan kebutuhan sistem. *Berkala Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 14(1), 76. <https://doi.org/10.22146/bip.28943>
- Ratri, D. K. (2014). Implementasi Peraturan Walikota Nomor 36 tahun 2013 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak. *Implementation Science*, 39(1), 1–15. <http://dx.doi.org/10.1016/j.biichi.2015.03.025> <http://dx.doi.org/10.1038/nature10402> <http://dx.doi.org/10.1038/nature21059> <http://jurnal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127> <http://dx.doi.org/10.1038/nrmicro2577>
- Ruhana, F., & Yuliana, Y. (2013). Implementasi Kebijakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10, 141–153. <https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/view/1065/1058>
- Setyawan, D., & Srihardjono, B. (2016). Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Desa Dengan Model Edward III Di Desa Landungsari Kabupaten Malang. *Jurnal Reformasi*, 6(2), 125–133. <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/download/689/673>
- Yuanita, S. K. S., Yaswinda, & Movitaria, M. A. (2022). Evaluasi Model CIPP Program Diklat Berjenjang Tingkat Dasar Untuk Meningkatkan Kompetensi Pendidikan Anak Usia Dini Di Kota Payakumbuh. *Braz Dent J.*, 33(1), 1–12.

Sumber lainnya :

- Undang- Undang Desa PP Nomor 72 Tahun 2005, PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa [JDIH BPK RI].
- Undang- Undang Desa Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Daerah, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [JDIH BPK RI]
- Undang- Undang Desa Pasal 86 Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Daerah Pedesaan, Sistem Informasi Desa (pokohkidul.desa.id), Sumber UU 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Website Desa Taeng, Desa Taeng (karyabangun.co.id).
<https://desakubenda.com/artikel/2021/2/26/tugas-pokok-dan-fungsi-kepala-desa-dan-perangkat-desa>

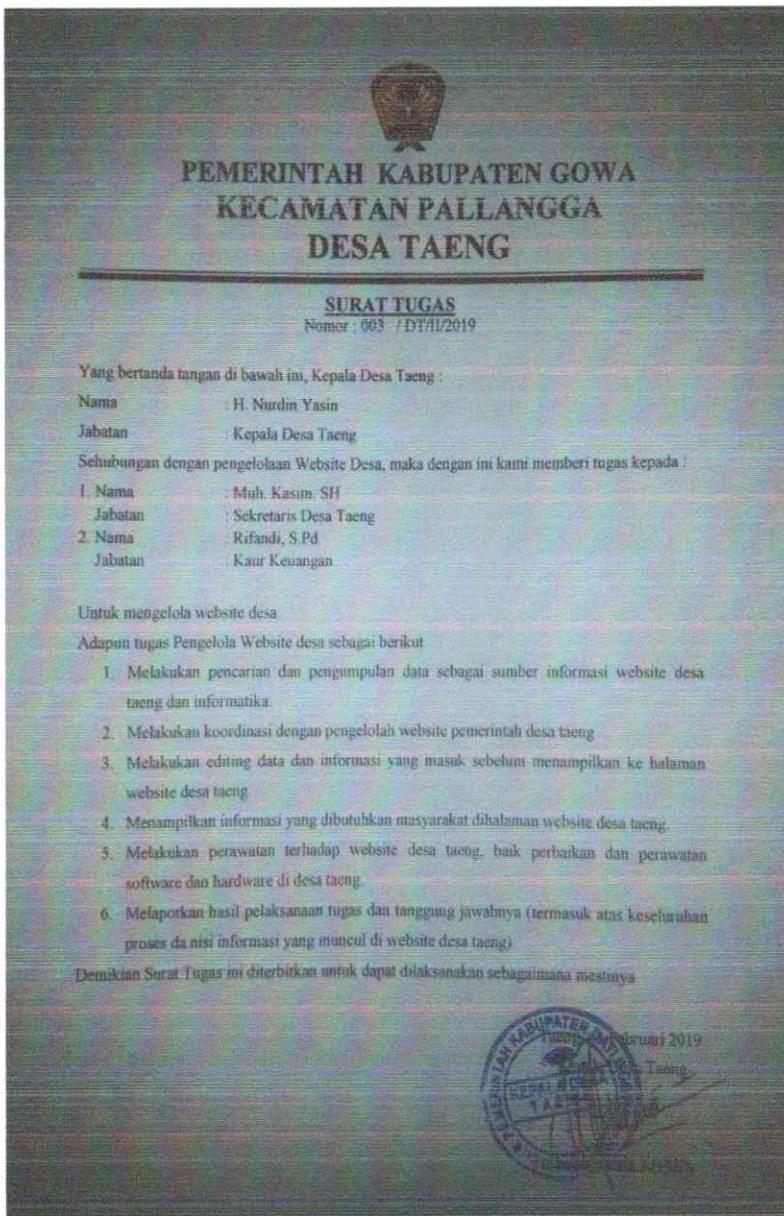
L
A
M
P
I
R
A
N

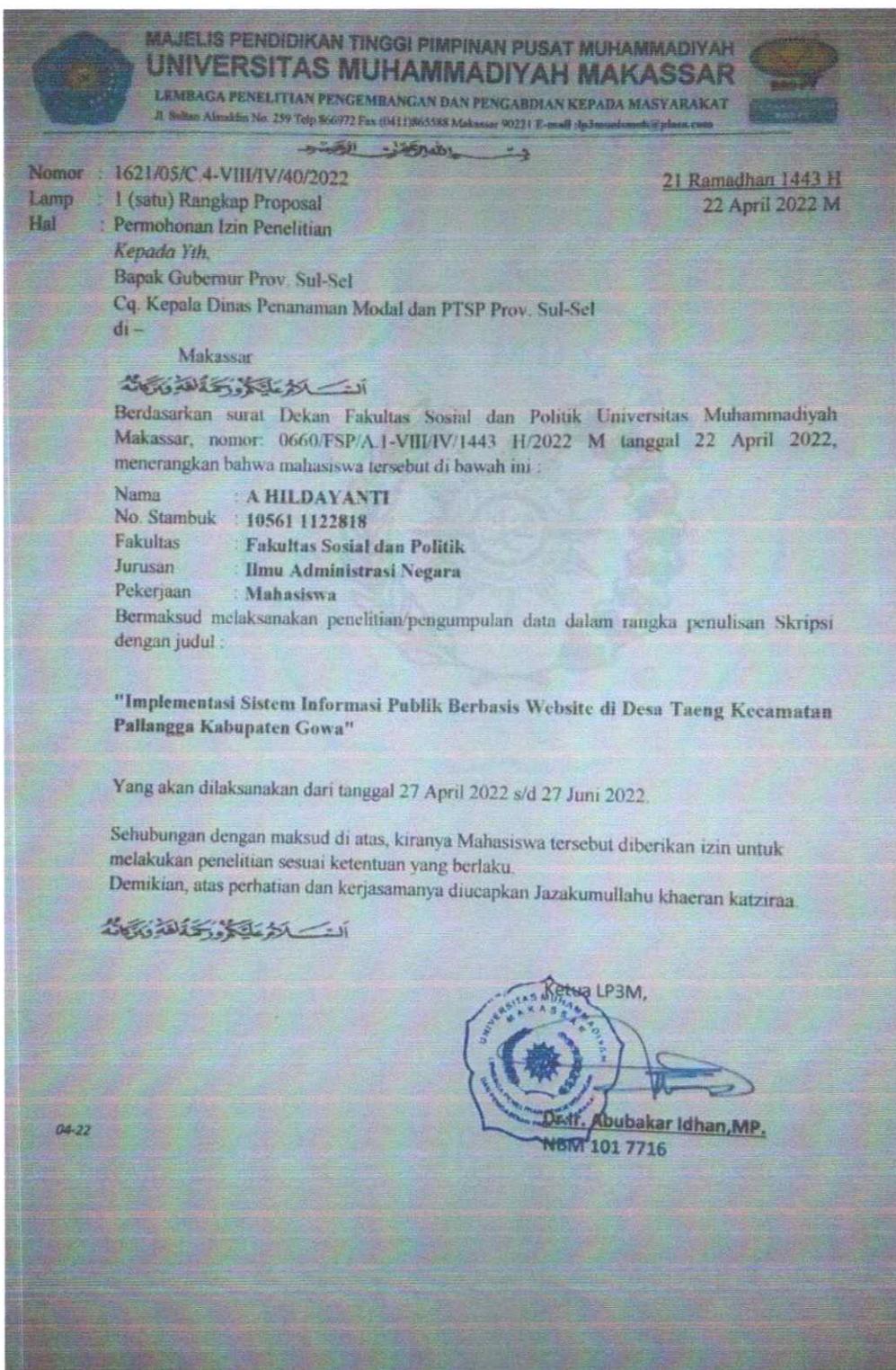
PEDOMAN WAWANCARA

Fokus masalah	Indikator	Poin Indikator	Pertanyaan
Implementasi Sistem Informasi Publik berbasis Website di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa	1.Komunikasi	1. Transmisi	<p>1. Bagaimana cara pemerintah desa memberikan informasi kepada masyarakat melalui website desa taeng?</p> <p>2. apakah ibu/bapak mengetahui bahwa desa taeng memiliki website desa? Jika iya, apakah bapak/ibu mendapatkan informasi dari website desa taeng?</p>
		2. Kejelasan	<p>1. Pelayanan apa saja yang didapatkan oleh masyarakat ketika mengakses website desa taeng?</p> <p>2. apakah bapak/ ibu mendapatkan pelayanan pada website desa ?</p>
		3. Konsistensi	<p>1. Apakah Bapak konsisten dalam memperbarui data-data tampilan yang ada di website?</p>
	2. Struktur Birokrasi	1. SOP	<p>1. Apa Landasan/ peraturan hukum dalam melaksanakan implementasi sistem informasi publik berbasis website di desa taeng?</p>
		2. Fragmentasi	<p>1. siapa yang bertanggung jawab dalam penerapan sistem informasi publik berbasis website didesa taeng?</p>
	3. Sumber daya	1. Sumberdaya Manusia	<p>1. bagaimana kesediaan SDM dalam penerapan sistem informasi berbasis website di desa ini?</p>

	Sarana dan prasarana	1. Sarana dan Prasana apa saja yang digunakan dalam penerapan sistem informasi berbasis website didesa taeng?
	Disposisi/ Sikap	1. bagaimana sikap kepala desa terhadap keberhasilan implementasi sistem informasi publik berbasis website di desa taeng?
Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Sistem Informasi Publik berbasis Website di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa	Faktor Pendukung	Apakah Bapak/Ibu mendukung implementasi sistem informasi berbasis website di desa taeng? Bagaimana tanggapan anda?
	Faktor penghambat	Apakah faktor yang menghambat Implementasi sistem informasi publik di desa taeng?

Surat Tugas Operator Website







**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

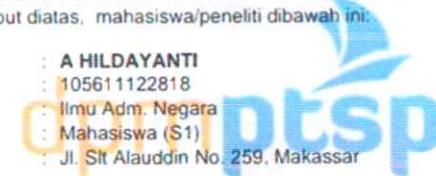
Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: 291/S.01/PTSP/2022	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Gowa
Perihal	<u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1621/05/C.4-VIII/I/40/2022 tanggal 22 April 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama	: A HILDYANTI
Nomor Pokok	: 105611122818
Program Studi	: Ilmu Adm. Negara
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Slt Alauddin No. 259, Makassar



PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PUBLIK BERBASIS WEBSITE DI DESA TAENG
KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **27 April s/d 27 Juni 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 27 April 2022

**A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



Dra. Hj. SUKARNIATY KONDOLELE, M.M.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
Nip : 19650606 199003 2 011

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar.
2. Pertinggal.



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. Masjid Raya No. 38 Tlp. 0411-887188 Sungguminasa 92111

Sungguminasa, 9 Mei 2022

Kepada Yth.

Nomor :	503/377-DPM-PTSP-PENELITIAN/V/2022	Kepala Desa Taeng Kecamatan Pallangga
Lamp :		Kabupaten Gowa
Perihal :	<u>Rekomendasi Penelitian</u>	di-
		<u>Tempat</u>

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor : 291.S.01/PTSP/2022 tanggal 27 April 2022 tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: A.HILDAYANTI
Tempat Tanggal Lahir	: Buriko / 22 Mei 1999
Nomor Pokok	: 105611122818
Jenis Kelamin	: Perempuan
Program Studi	: ILMU ADM. NEGARA
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa(S1)
Alamat	: Jl. Batu Titti

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis/Dissertasi Lembaga di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul "**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PUBLIK BERBASIS WEBSITE DI DESA TAENG KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA**"

Selama : 27 April 2022 s/d 27 Juni 2022
Pengikut :

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa;
2. **Penelitian/Pengambilan Data** tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Kepada yang bersangkutan wajib memakai masker;
5. Kepada yang bersangkutan wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
a.n. BUPATI GOWA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
HINDRA SETIAWAN ABBAH,S.Sos,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19721026 199303 1 003

Tembusan Yth:

1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar,
3. Yang bersangkutan;
4. Pertunggal

1. Dokumen ini diterbitkan sistem Sicaria Cloud berdasarkan data dan Pemohon, tersimpan dalam sistem Sicaria Cloud, yang menjadi tanggung jawab Pemohon.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN: BSSN




**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
KECAMATAN PALLANGGA
DESA TAENG**

Jl. Pelita Campagaya, Desa Taeng Kec. Pallangga Kab.Gowa Kode Pos 92161

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 45 /DT/VI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Nurdin Yasin

Jabatan : Kepala Desa Taeng

Alamat : Jl.Campagaya Desa Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **A.HILDAYANTI**

Tempat/Tanggal Lahir : Buriko, 22 Mei 1999

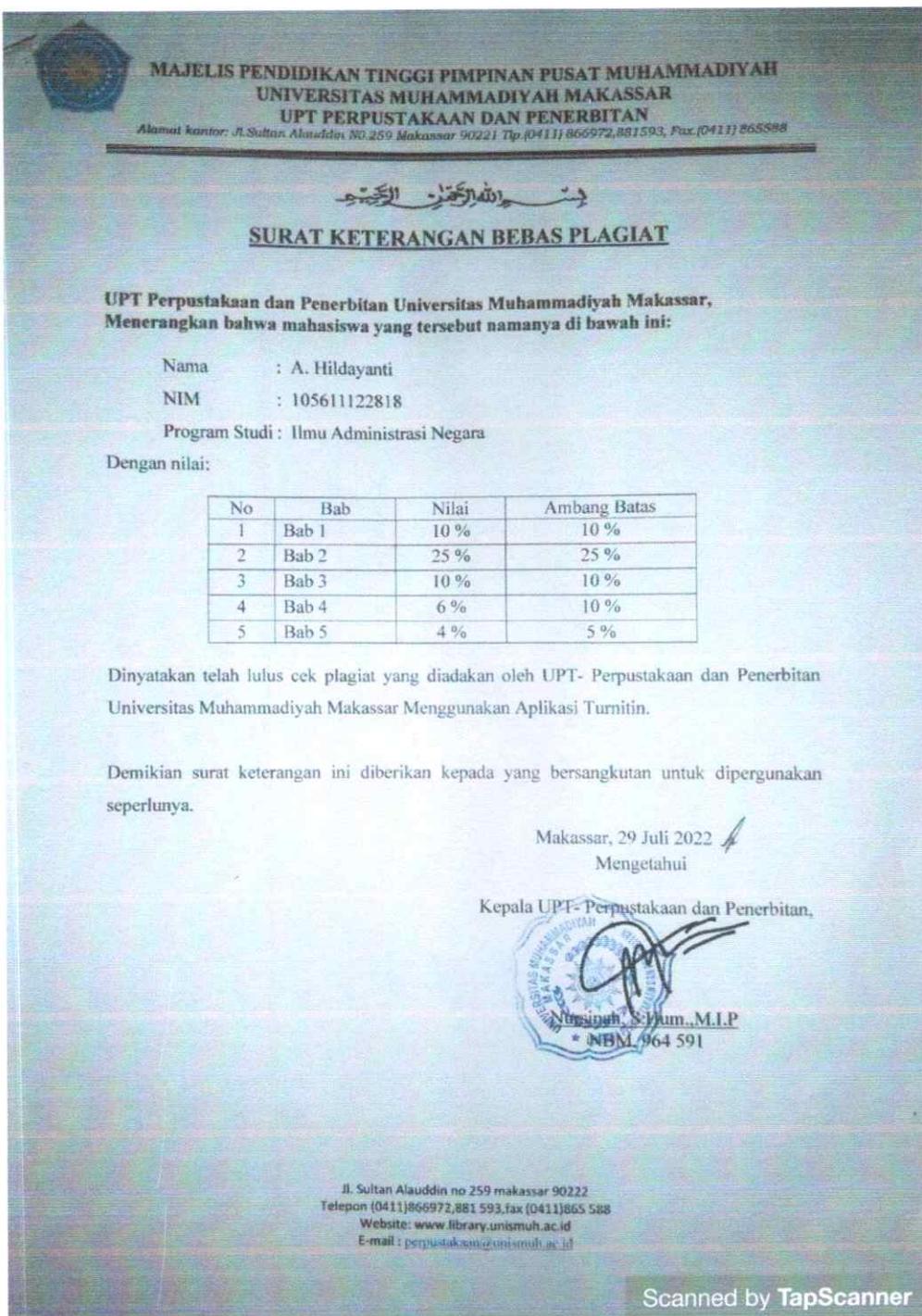
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar

Alamat : Perumahan Griya Minasasari Blok D12

Telah Melakukan kegiatan penelitian/pengumpulan Data yang berjudul "**Implementasi Sistem Informasi Publik Berbasis Website di Desa Taeng Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa**".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.







Wawancara bersama Bapak Kepala Desa Taeng



Wawancara Bersama Bapak Sekertaris Desa Taeng Sekaligus Operator Website Desa Taeng



Wawancara Bersama Bapak Kepala Dusun Desa Taeng



Wawancara Bersama Masyarakat Ibu Hamdana



Wawancara Bersama Masyarakat bapak Ilham



Wawancara bersama Masyarakat Ibu Aliyah

RIWAYAT HIDUP



A.Hidayanti. Lahir di Buriko pada tanggal 22 Mei 1999. Anak kedua dari pasangan Ayahanda A.Takbir dan Ibunda Erna. Penulis memulai pendidikan pada tahun 2005 di TK PGRI Lompoloang. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan di SD Negeri 189 Lompoloang kemudian pindah ke SD Negeri 418 Tellesang pada tahun 2009 hingga tamat pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Pitumpanua dan lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan lagi di SMA Negeri 9 Makassar. Selanjutnya pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan mengambil program studi Ilmu Administrasi Negara dan meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada tahun 2022 dengan menyusun Skripsi berjudul “Implementasi Sistem Informasi Publik Berbasis Website di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa”.